LAPORAN AKHIR

Survei Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara

Desember 2022

KERJASAMA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

SURVEI INDEKS KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN AKHIR

KERJA SAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

HP

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	:	Survei Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara
Ketua Tim Peneliti	:	Efri Novianto, S.Sos.,M.Si
Seminar	:	13 Desember 2022
Hasil Seminar	:	Revisi
Revisi	:	15 Desember 2022

Tenggarong, Desember 2022

Kepala Balitbangda Kutai Kartanegara

.....

NIP.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan **"Laporan Akhir Survei Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara".**

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pimpinan beserta staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, atas kepercayaan kepada tim untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih dan Penghargaan juga kami sampaikan kepada narasumber yang telah banyak membantu dalam penelitian ini. Semoga Allah SWT, merindhoi apa yang telah kita lakukan.

Tenggarong, Desember 2022

Tim Peneliti

ABSTRAK

Salah satu permasalahan utama pembangunan di Kutai Kartanegara adalah Pemerataan pembangunan. Dalam dokumen RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, permasalahan tersebut terbagi dua yaitu belum meratanya pembangunan dan layanan infrastruktur dasar dan belum optimalnya pemerataan aksebilitas konektivitas wilayah. Padahal keberadaan infrastruktur yang baik menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat, berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, menjadi masukan bagi seluruh sektor pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi layanan infrastruktur dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti infrastruktur pendidikan (PAUD, SD, SMP dan SNFI), infrastruktur kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), infrastruktur pekerjaan umum (jalan, jembatan, embung dan irigasi) serta infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman (air bersih, drainase dan persampahan), serta terhadap layanan infrastruktur penunjang perekonomian (pasar) dan pariwisata.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode survei. yang dilaksanakan di 11 Kecamatan dan 28 kelurahan/desa dengan jumlah responden keseluruhan 280 orang. Dalam pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur dengan dibantuk instrument penelitian berupa kuisioner.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 70,79 dengan kategori C atau sedang. Nilai indeks tertinggi terdapat pada infrastruktur pendidikan dengan nilai indeks 77,62 diikuti bidang kesehatan dengan nilai indeks 75,95, selanjutnya bidang jaringan air bersih dengan nilai indeks 75,67. Nilai indeks terendah terdapat pada infrastruktur embung dan irigasi pertanian dengan nilai indeks 58,39 diikuti bidang Infrastruktur Pendukung Destinasi Wisata dan Infrastruktur Drainase/Parit Pemukiman/Perumahan dengan nilai indeks masing-masing 66,70. Sedangkan jika dilihat dari indeks komposit pembentuk Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), indeks tertinggi ada di kemanfaatan infrastruktur yaitu sebesar 74,17 dan terendah pada pelibatan tenaga kerja lokal yaitu sebesar 60,63.

Keyword: Indeks, Layanan, Infrastruktur, Kutai Kartanegara

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
ABSTRAK iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I 11
PENDAHULUAN 11
1.1. Latar Belakang 11
1.2. Rumusan Masalah 12
1.3. Tujuan Penelitian 12
1.4. Kegunaan Penelitian 13
BAB II 14
KAJIAN PUSTAKA 14
2.1. Infrastruktur 14
2.1.1. Defenisi Infrastruktur 14
2.1.2. Jenis Infrastruktur 15
2.2. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 16
2.2.1. Teori Kepuasan Masyarakat 16
2.2.2. Layanan infrastruktur 18
2.3. Indikator layanan infrastruktur 18
2.4. Ruang Lingkup dan Kerangka Pemikiran 20
BAB III 21
METODE PENELITIAN 21
3.1. Jenis Penelitian 21
3.2. Teknik Pengumpulan Data 22
3.3. Teknik Analisis Data 23
BAB IV 25
HASIL DAN PEMBAHASAN 25
4.1. Hasil Penelitian 25
4.2. Pembahasan 32
BAB V 64
PENUTUP 64
5.1. Kesimpulan 64
5.2. Rekomendasi 64
DAFTAR PUSTAKA 66

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Sebaran Populasi dan Sampel 22
Tabel 3. 2 Skala Nilai, Kategori dan Makna 23
Tabel 3. 3 Waktu dan Pelaksanaan Penelitian 24
Tabel 4. 1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Per Kecamatan 26
Tabel 4. 2 Dimensi, Nilai Indeks, Nilai Konversi, Kategori dan Makna Indeks 62
Tabel 4. 3 Indeks Komposit pembentuk IKLI 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Kerangka Pemikiran Penelitian 20
Gambar 4. 1 Luasan wilayah Per Kecamatan 25
Gambar 4. 2 Sebaran Kelompok Umur per Jenis Kelamin 26
Gambar 4. 3 Karakteristik Responden Menurut Usia 29
Gambar 4. 4 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan 29
Gambar 4. 5 Karakteristik Responden Menurut Agama 30
Gambar 4. 6 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan 31
Gambar 4. 7 Karakteristik Responden Menurut Suku 31
Gambar 4. 8 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 32
Gambar 4.9 Ketersediaan Sarana Pendidikan 33
Gambar 4. 10. Kualitas Sarana Pendidikan 33
Gambar 4.11. Kesesuaian Sarana Pendidikan dengan Kebutuhan 34
Gambar 4.12. Keberadaan Sarana Pendidikan Bermanfaat Bagi Masyarakat 34
Gambar 4. 13 Pelibatan Tenaga Kerja Lokal Dalam Tahapan Pembangunan Sarana Pendidikan 35
Gambar 4.14. Keberadaan Sarana Pendidikan Berkontribusi Bagi Perekonomian Masyarakat Sekitar 35
Gambar 4.15. Ketersediaan Sarana Kesehatan (Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Daerah) 36
Gambar 4. 16 kualitas sarana kesehatan 36
Gambar 4.17. Kesesuaian Sarana Kesehatan Dengan Kebutuhan Masyarakat 37
Gambar 4.18. Keberadaan sarana kesehatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat 37
Gambar 4.19. Pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan sarana kesehatan 38
Gambar 4.20. Sarana Kesehatan Tersebut, Apakah Berkontribusi Bagi Perekonomian Masyarakat Sekitar 38
Gambar 4. 21. ketersediaan jalan dan/atau jembatan penghubung 39
Gambar 4.22. Kualitas Jalan dan/atau Jembatan 39
Gambar 4. 23. Kesesuaian Jalan dan/atau Jembatan dengan Kebutuhan Masyarakat 40
Gambar 4.24.Keberadaan Jalan dan/atau Jembatan Bermanfaat bagi Masyarakat 40
Gambar 4.25. Pelibatan Tenaga Kerja Lokal Dalam Tahapan Pembangunan Jalan Dan Jembatan 41
Gambar 4.26. Keberadaan Jalan dan Jembatan Berkontribusi Bagi Perekonomian Masyarakat Sekitar 41

Gambar 4.27. Ketersediaan Embung dan/Atau Irigasi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara 42
Gambar 4.28. Kualitas Embung dan/atau Irigasi 43
Gambar 4.29. Kesesuaian Embung dan/atau Irigasi dengan Kebutuhan Masyarakat 43
Gambar 4.30. Keberadaan embung dan/atau irigasi bermanfaat bagi masyarakat 44
Gambar 4.31. Pelibatan Tenaga Kerja Lokal Dalam Tahapan Pembangunan Embung dan/atau Irigasi 44
Gambar 4.32. Keberadaan Embung dan/atau Irigasi Berkontribusi bagi Perekonomian Petani 45
Gambar 4.33. Ketersediaan Jaringan Air Bersih diperumahan atau Pemukiman di Tempat Tinggal Warga 46
Gambar 4.34. Kualitas Air Bersih yang Tersedia diperumahan/Pemukiman Warga 46
Gambar 4.35. Kesesuaian Air Bersih yang diterima dengan Kebutuhan Masyarakat 47
Gambar 4. 36. Keberadaan Jaringan Air Bersih Bermanfaat Bagi Masyarakat 47
Gambar 4.37. Pelibatan Tenaga Kerja Lokal Dalam Tahap Pembangunan Jaringan Air Bersih 48
Gambar 4.38. Keberadaan Jaringan air bersih Mampu Mengatasi Masalah ke Kurangan Air Bersih 48
Gambar 4.39. Ketersediaan Drainase/Parit Perumahan atau Pemukiman Warga 49
Gambar 4.40. Kualitas Drainase/Parit Perumahan/Pemukiman .. 49
Gambar 4.41. Kesesuaian drainase/parit perumahan/pemukiman terhadap kebutuhan masyarakat 50
Gambar 4.42. Keberadaan drainase/parit perumahan/pemukiman bermanfaat bagi masyarakat 50
Gambar 4. 43. Pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan drainase/parit perumahan/pemukiman 51
Gambar 4.44. Keberadaan drainase/parit mampu mencegah terjadinya banjir/genangan 51
Gambar 4. 45. Kesetersediaan layanan persampahan diperumahan/pemukiman ditempat tinggal warga 52
Gambar 4. 46. Kualitas layanan persampahan diperumahan/pemukiman tempat tinggal warga 53
Gambar 4. 47. Kesesuaian layanan persampahan dengan kebutuhan masyarakat 53
Gambar 4. 48. Keberadaan layanan persampahan bermanfaat bagi masyarakat 53
Gambar 4. 49. Pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan layanan persampahan 54

Gambar 4. 50. Keberadaan layanan persampahan mampu mencegah banjir dan permasalahan lingkungan 55
Gambar 4. 51. Ketersediaan pasar di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 55
Gambar 4. 52. Kualitas Bangunan Pasar 56
Gambar 4. 53. Kesesuaian bangunan pasar dengan kebutuhan masyarakat 56
Gambar 4. 54. Keberadaan pasar bermanfaat bagi masyarakat 57
Gambar 4. 55. Pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan pasar 57
Gambar 4. 56. Keberadaan pasar berkontribusi bagi perekonomian masyarakat 58
Gambar 4. 57. ketersediaan infrastruktur destinasi wisata di wilayah Kabupaten Kutai kartanegara 58
Gambar 4. 58. Kualitas infrastruktur pendukung destinasi wisata 59
Gambar 4. 59. Kesesuaian infrastruktur pendukung destinasi wisata dengan kebutuhan masyarakat 59
Gambar 4.60. Keberadaan infrastruktur destinasi wisata bermanfaat bagi wisatawan dan masyarakat 60
Gambar 4. 61. Pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan infrastruktur pendukung destinasi wisata 60
Gambar 4. 62. Keberadaan infrastruktur pendukung destinasi wisata berkontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam dokumen RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, permasalahan tersebut dibagi dua yaitu belum meratanya pembangunan dan layanan infrastruktur dasar dan belum optimalnya pemerataan, aksebilitas dan konektivitas wilayah.

Permasalahan infrastruktur diatas penting dan harus segera di tangani, alasan mendasar karena infrastruktur yang baik memiliki peran penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan; alasan yang lain juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat; dan serta keberhasilan pembangunan infrastruktur sebagai input atau masukan bagi seluruh sektor pembangunan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan nilai investasi daerah dan membuka keterisolasian wilayah.

Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara pembangunan infrastruktur adalah misi keempat berupa meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah dengan sasaran yang dicapai adalah berupa peningkatan pemerataan infrastruktur dan penataan wilayah. Dalam rangka mengevaluasi ketercapaian misi tersebut, maka perlu untuk melakukan survei terhadap layanan infrastruktur yang dibangun atau diberikan oleh pemerintah. Masyarakat sebagai pengguna infrastruktur selama ini tentu tepat untuk dimintai pendapatnya terkait layanan infrastruktur yang diterimanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara; seperti layanan infrastruktur terkait dengan layanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya infrastruktur pendidikan (PAUD, SD, SMP dan SNFI), infrastruktur kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), infrastruktur pekerjaan umum (jalan, jembatan, embung dan irigasi) serta infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman (air bersih, drainase dan persampahan). Selain itu juga survei ini ditujukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap layanan infrastruktur penunjang perekonomian (pasar) dan pariwisata.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat Kutai Kartanegara terhadap layanan Infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Berapakah nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat Kutai Kartanegara terhadap layanan infrastruktur yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah memperoleh gambaran obyektif berdasarkan persepsi masyarakat Kutai Kartanegara sebagai pengguna layanan infrastruktur tentang kepuasan layanan infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembuatan kebijakan terkait infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Infrastruktur

2.1.1. Defenisi Infrastruktur

Menurut Stone dalam Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2003).

Menurut *Macmillan Dictionary of Modern Economics* (1992), infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Sedangkan *The Routledge Dictionary of Ecomics* (1995) memberikan pengertian yang lebih luas yaitu bahwa infrastruktur juga merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung melalui penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya.

Larimer (1994) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan institusi dimana bergantung pada pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area, komunitas dan sistem.Infrastruktur meliputi variasi yang luas dari jasa, institusi dan fasilitas yang mencakup sistem

transportasi dan sarana umum untuk membiayai sistem, hukum dan penegakan hukum pendidikan dan penelitian.

2.1.2. Jenis Infrastruktur

The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya);
2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi;
3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Infrastruktur prioritas tersebut dikategorikan sebagai infrastruktur dasar yang harus diatur pemerintah karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Adapun infrastruktur prioritas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur transportasi seperti sarana dan prasarana perkeretaapian, pelabuhan, pelabuhan penyeberanga, kebandarudaraan dan perhubungan darat;
2. Infrastruktur jalan seperti jalan umum, tol, jembatan dan jembatan tol;
3. Infrastruktur pengairan seperti waduk, bendungan, saluran pembawa air baku dan bangunan perairan lainnya;
4. Infrastruktur air minum seperti bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum;
5. Infrastruktur air limbah seperti instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama;

6. Sarana persampahan seperti pengangkut, tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
7. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
8. Infrastruktur ketenagalistrikan seperti pembangkit, transmisi, gardu, jaringan ataua distribusi tenaga listrik, sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi;
9. Infrastruktur minyak dan gas bumi seperti kilang, depo, transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.

Dalam konteks Pemerintahan Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan tentang standar pelayanan minimal yang wajib diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Oleh karena itu belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar setiap warga negara di daerah, meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Penelitian ini nantinya diarahkan pada penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu infrastruktur pendidikan (sekolah dan perpustakaan), infrastruktur kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), infrastruktur pekerjaan umum (jalan, jembatan dan irigasi) dan infastruktur perumahan dan kawasan pemukiman (perumahan, drainase dan persampahan).

2.2. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

2.2.1. Teori Kepuasan Masyarakat

Kepuasan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *satiffaction* berasal dari bahasa latin *"satis"* yang berarti cukup baik, memadai, dan *"fatio"* yang berarti melakukan atau membuat. Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai (Tjiptono dan Chandra, 2005). Menurut Supranto

(1997), kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya.

Sementara menurut Kotler dan Armstrong (2008) yang mengaitkan dengan kepuasan pelanggan, menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkatan dimana kinerja produk relatif atau sesuai dengan ekspektasi pembeli. Jika kinerja produk tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan kecewa. Jika kinerja produk sesuai dengan ekspetasi, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi ekspetasi, pelanggan sangat puas.

Menurut Nasution (2001) kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2007) kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja atau produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Menurut Umar (1997) kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya.

Sementara itu, menurut Pasolong (2010), mengatakan bahwa semakin baik kepemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi apabila masyarakat mendapat pelayanan yang baik dan merasa terpuaskan akan pelayanan tersebut.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut diatas tentang kepuasan, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Apabila kinerja pemerintah berada di bawah harapan, masyarakat tidak puas, sebaliknya apabila kinerja pemerintah memenuhi harapan, masyarakat puas dan apabila kinerja pemerintah melebihi harapan, masyarakat akan sangat puas yang diwujudkan dalam bentuk dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang dijalankan.

2.2.2. Layanan infrastruktur

Infrastruktur merupakan suatu kegiatan yang menciptakan atau menambah guna *(utility)*. Guna yang diciptakan oleh kegiatan infrastruktur adalah guna tempat *(place utility)* dan guna waktu *(time utility)*. Guna tempat, berkaitan dengan kegiatan pemindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan Guna waktu adalah mampu memindahkan barang atau orang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan dalam waktu yang lebih cepat dan singkat.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur akan memberikan manfaat yang lebih bagi lintas sektor hidup dan kehidupan masyarakat. Pada sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur akan memberi manfaat bagi perluasan pasar dan mendekatkan konsumen dengan produsen, menjaga stabilitas harga, kemudahan akses dan hadirnya produk unggulan daerah yang menjadi kebanggan daerah.

Pada sektor sosial dan budaya, pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat bagi pelestarian seni budaya di daerah terpencil, mendekatkan akses pendidikan dan ilmu pengetahuan, akses pelayanan kesehatan yang lebih baik, tumbuhnya solidaritas antar wilayah/daerah. Begitu pula pada sektor politik, pembangunan infrastruktur dapat mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan menguatkan persatuan antar sesama warga, serta terciptanya pertahanan dan keamanan antar wilayah.

2.3. Indikator layanan infrastruktur

Keberhasilan pembangunan infrastruktur pada suatu daerah/wilayah dapat dilihat pada ketercapaian indikator manfaat *(outcome)* dan dampak *(impact)*. Menurut Gibson, Donely dan Ivancevich (1997) terkait pengukuran efektivitas jenis pembangunan infrastruktur dapat mengadopsi dan memodifikasi pendekatan teori sistem yang meliputi 6 (enam) kriteria, yaitu:

1. Ketersediaan fisik *(availability)*

Ketersediaan fisik *(availability)* adalah bahwa dalam setiap aktivitas belanja Negara/daerah yang diperuntukan bagi kegiatan fisik tentunya indikator dasarnya akan menghasilkan output yang berupa barang/bangunan secara fisik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik;

2. Kualitas fisik *(quality)*

   Kualitas fisik *(quality)* adalah kualitas output yang dihasilnya, yaitu bahwa aspek efektifitas akan lebih *reliable* apabila cakupannya lebih luas, yaitu tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukung kualitas *output* yang baik dan optimal;

3. Kesesuaian *(Appropriatensss)*

   Kesesuaian *(appropriateness)* adalah kesesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat selaku penerima manfaat

4. Efektivitas pemanfaatan *(utility)*

   Pemanfaatan *(utility)* adalah tingkat pemanfaatan atas *output* yang telah dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atas *output*, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya;

5. Penyerapan tenaga kerja *(job creation)*

   Penyerapan tenaga kerja *(job creation)* adalah tingkat penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan/ peningkatan infrastruktur; dan

6. Kontribusi pada perekonomian.

   Hal ini dilandasi pemikiran bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan perekonomian sehingga perlu untuk menilai seberapa besar infrastruktur memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di suatu wilayah/daerah.

2.4. Ruang Lingkup dan Kerangka Pemikiran

Ruang lingkup penelitian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini meliputi layanan infrastruktur yang terkait dengan layanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara infrastruktur pendidikan (PAUD, SD, SMP dan SNFI), infrastruktur kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), infrastruktur pekerjaan umum (jalan, jembatan, embung dan irigasi) serta infastruktur perumahan dan kawasan pemukiman (air bersih, drainase dan persampahan). Selain itu juga survei ini ditujukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap layanan infrastruktur penunjang perekonomian (pasar) dan pariwisata.

Terhadap layanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, akan diukur dengan menggunakan enam dimensi yaitu: ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, pemanfaatan, penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap perekonomian.

Gambar 1 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

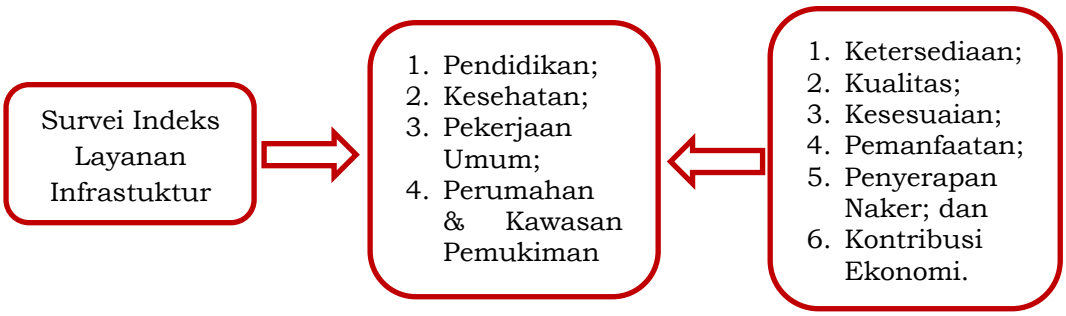

Sumber: Peneliti, 2022, diolah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode survei. Metode survei adalah sebuah teknik riset atau penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dengan memberi batas yang jelas atas data kepada suatu obyek tertentu. Survei dalam hal ini dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data, dan lain sebagainya agar hasil yang dicapai secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak dimulainya penelitian sampai hasil akhir berdasarkan pengumpulan data informasi yang umumnya disertai dengan gambar, angka, tabel, grafik, dan lain sebagainya.

Lokasi survei persepsi masyarakat terhadap layanan infastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan di sebelas kecamatan yaitu Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Muara Badak, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Samboja, Muara Jawa dan Tenggarong Seberang. Penetapan sebelas kecamatan tersebut berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk yang besar dan dianggap dapat mewakili tujuh kecamatan lainnya yaitu Muara Muntai, Sanga-Sanga, Marang Kayu, Kembang Janggut, Tabang, Kenohan dan Muara Wis.

Dengan jumlah populasi (penduduk) mencapai 734.485 jiwa, dengan tingkat kepercayaan 94% dan *margin of error* ± *6%,* maka sampel ditetapkan sebesar 278 responden dibulatkan menjadi 280 responden yang tersebar secara proporsional di sebelas Kecamatan. Penetapan jumlah responden menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Na^2}$$

n = sampel

N = populasi

a = alpa/ *margin of error*

Adapun penetapan sebelas kecamatan sebaran responden didasarkan pada jumlah masing-masing penduduk. Dengan pertimbangan keterwakilan wilayah, maka ditetapkan 11 Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar sebagaimana tergambar pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Sebaran Populasi dan Sampel

No	Kecamatan	Populasi	%	Sampel		Desa/Kel
1	Loa Kulu	53.652	8,78	25	20	2
2	Loa Janan	69.876	11,43	32	30	3
3	Anggana	35.009	5,73	16	20	2
4	Muara Badak	47.130	7,71	22	20	2
5	Tenggarong	108.539	17,76	50	50	5
6	Sebulu	40.652	6,65	19	20	2
7	Kota Bangun	36.205	5,92	17	20	2
8	Muara Kaman	42.073	6,88	19	20	2
9	Samboja	67.345	11,02	31	30	3
10	Muara Jawa	41.778	6,83	19	20	2
11	Tenggarong Seberang	69.003	11,29	32	30	3
Jumlah		**611.262**			**280**	**28**

Sumber: Diolah dari data Disdukcapil 2021

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik survei tatap muka yaitu dengan cara mewawancarai responden secara langsung dibantu dengan daftar pertanyaan semi terstruktur berupa lembaran kuesioner. Teknik ini dimaksudkan untuk mencegah bias informasi akibat salah persepsi terhadap pertanyaan dan/ atau jawaban yang diberikan oleh responden. Teknik penentuan responden menggunakan metode *multistage random sampling* atau metode penentuan responden secara bertingkat mulai dari tingkat Kecamatan, kemudian Desa/ Kelurahan, RT dan responden (laki-laki dan perempuan) yang ditetapkan secara proporsional.

3.3. Teknik Analisis Data

Hasil jawaban responden yang ada dalam lembar kuesioner selanjutnya dikonversi menjadi angka dan dianalisis menggunakan alat analisis *frekuensi*.

Jika jawaban a skor 4

Jika jawaban b skor 3

Jika jawaban c skor 2

Jika jawaban d skor 1

Jawaban responden tersebut kemudian dibagi dalam dimensi dengan kontribusi per dimensi dalam IKLI yaitu sebagai berikut:

1. Ketersediaan fisik *(availability)* dengan kontribusi sebesar 25 %;
2. Kualitas fisik *(quality)* dengan kontribusi sebesar 25%;
3. Kesesuaian *(approriateness)* dengan kontribusi sebesar 10%;
4. Efektivitas pemanfaatan *(utility)* dengan kontribusi sebesar 25%;
5. Penyerapan tenaga kerja *(job creation)* dengan kontribusi sebesar 5%; dan
6. Kontribusi pada perekonomian dengan kontribusi sebesar 10%.

Hasil penilaian tersebut kemudian diambil nilai rata-rata untuk kemudian dikalikan dengan nilai dasar 25; untuk selanjutnya hasilnya dimasukan dalam tabel interval selanjutnya diberi kategori dan makna.

Tabel 3. 2 Skala Nilai, Kategori dan Makna

SKALA NILAI	KATEGORI	MAKNA KINERJA
≤ 39,99	E	Sangat Rendah
40,00 – 59,99	D	Rendah
60,00 - 79,99	C	Sedang
80,00 – 89,99	B	Tinggi
≥ 90	A	Sangat Tinggi

Sumber: diadopsi dari Permendagri 38 Tahun 2020

3.4. Waktu dan Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 75 hari terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 15 Desember 2022, dengan beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

1. **Tahap persiapan**

   Tahap ini tim peneliti akan menyiapkan proposal penelitian yang berisi seputar teknis dan ruang lingkup penelitian. Waktu dan biaya pelaksanaan penelitian, instrument penelitian serta seminar proposal ke pada Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANGDA) Kabupaten Kutai Kartanegara

2. **Tahap pelaksanaan**

   Tahap ini, tim melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan, analisis data dan penyusunan laporan setelah pengumpulan data lapangan, dan seminar hasil kegiatan penelitian.

3. **Tahap pelaporan**

   Tahap ini merupakan tahap terakhir dari kegiatan penelitian, tim akan menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun waktu dan pelaksanaan penelitian dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 3 Waktu dan Pelaksanaan Penelitian

No	Nama Kegiatan	MINGGU ... BULAN											
		OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penandatanganan kontrak penelitian	X											
2	Penyusunan desain penelitian dan kajian literarur		X										
3	Presentasi Proposal			X									
4	Pembagian Tugas Penelitian				X								
5	Pengumpulan data dan observasi lapangan					X	X						
6	Analisis data							X	X				
7	Presentasi Hasil Penelitian								X	X			
8	Pembuatan Laporan Akhir									X	X		
9	Penyerahan Laporan Akhir										X		

Sumber: diolah oleh tim peneliti 2022

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1.Profil Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas mencapai ± 27.263,10 Km² dan merupakan kabupaten terluas kedua di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kabupaten Kutai Timur.

Tabang merupakan kecamatan terluas dengan komposisi 28,5% dari luas Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan wilayah tersempit adalah Sanga-Sanga dengan komposisi hanya 0,9%.

Gambar 4. 1 Luasan wilayah Per Kecamatan

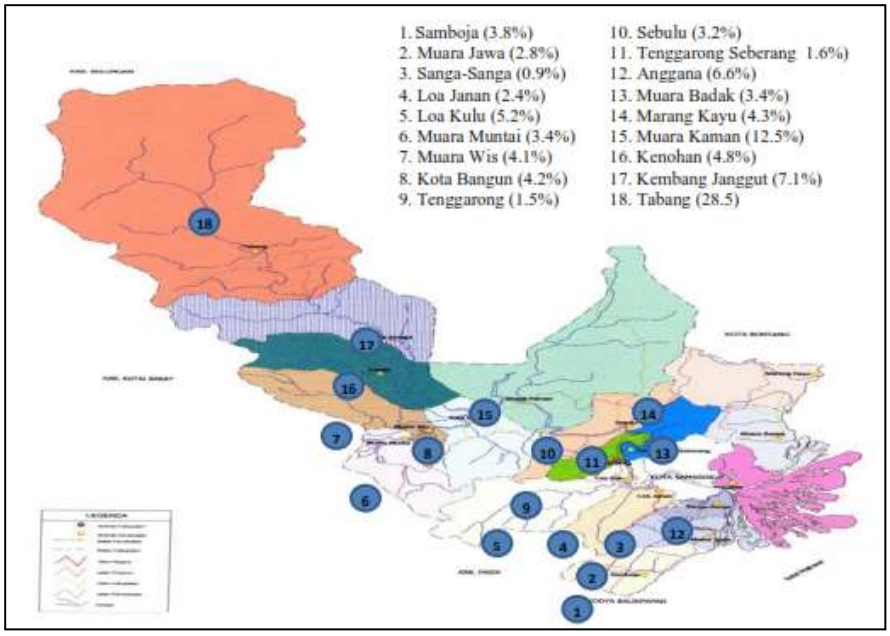

Sumber: BPS Kutai Kartanegara

Pola persebaran penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara menurut luas wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan yang mencolok. Tenggarong adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 275 jiwa/Km^2

sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Tabang yaitu 2 jiwa/Km^2.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Area	Jumlah	Kepadatan
1	Muara Muntai	928,6	20.308	22
2	Loa Kulu	1.405,70	54.124	39
3	Loa Janan	644,2	70.544	110
4	Anggana	1.798,80	35.813	20
5	Muara Badak	939,09	47.373	50
6	Tenggarong	398,1	109.466	275
7	Sebulu	859,5	41.048	48
8	Kota Bangun	1.143,74	36.301	32
9	Kenohan	1.302,20	11.701	9
10	Kembang Janggut	1.923,90	23.972	12
11	Muara Kaman	3.410,10	42.698	13
12	Tabang	7.764,50	12.111	2
13	Samboja	1.045,90	68.016	65
14	Muara Jawa	754,5	42.224	56
15	Sanga-Sanga	233,4	20.178	86
16	Tenggarong Seberang	437	69.581	159
17	Marang Kayu	1.165,71	27.205	23
18	Muara Wis	1.108,16	9.287	8
Total		**27.263,10**	**741.950**	**57**

Sumber: BPS Kutai Kartanegara

Kepadatan penduduk kelompok umur adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk kelompok umur menunjukkan proporsi umur berdasarkan kelompok umur terbesar pada umur 40 tahun ke atas (31,0%), kedua pada kelompok umur 25-39 tahun (25.2%), sedangkan proporsi terendah pada kelompok umur 20-24 tahun (8.0%).

Gambar 4. 2 Sebaran Kelompok Umur per Jenis Kelamin

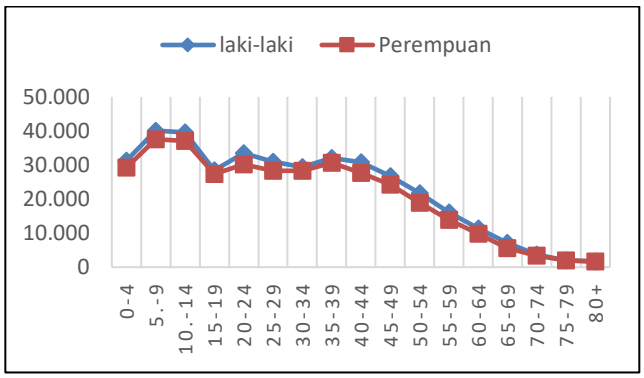

Sumber: Diolah dari data BPS Kutai Kartanegara

4.1.2.Profil Pemerintah Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini dipimpin oleh Drs. Edi Damansyah, M.Si selaku Bupati dan H. Rendi Solihin selaku Wakil Bupati. Terpilih secara demokratis melalui proses pemilihan pada 9 Desember 2020 yang lalu. Dengan *tag line* "menuju Kukar Idaman", Edi-Rendi mengusung Visi mewujudkan Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia, dengan 5 Misi Pembangunan yaitu:

1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah; dan
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Selanjutnya Visi dan Misi selama kampanye tersebut dijadikan dasar penyusunan RPMJD Kutai Kartanegara sehinga menjadi Visi dan Misi Pembangunan Kutai Kartanegara periode 2021-2026.

Untuk percepatan pencapaian Visi dan Misi pembangunan tersebut, maka disusunkan 23 program dedikasi yang merupakan program dedikasi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Digitalisasi Pelayanan Publik (Disapa), Aparatur Negara Bahagia, Kukar Bebaya, 1000 Guru Sarjana, Kukar Berkah, Beasiswa Kukar Idaman,

Keluarga Peduli Kesehatan, Kukar Siap Kerja, Kukar Berbudaya, Gerakan Etam Mengaji (Gema) Idaman, Kesejahteraan Sosial Idaman, Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan, Hilirisasi Produk Pertanian, Kukar Kaya Festival, Usaha Kecil Idaman, Kukar Kreatif Idaman, Pemantapan Konektifitas Wilayah, Fasilitasi Perumahan Rakyat, Air Bersih Desa, Terang Kampongku, Desa Ramah Lingkungan, Kukar Peduli Lingkungan dan Dunia Usaha Peduli Lingkungan.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara menempatkan pembangunan infrastruktur dalam Misi keempat yaitu "meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah" dengan sasaran yang harus dicapai adalah peningkatan pemerataan infrastruktur dan penataan wilayah. Untuk mengevaluasi ketercapaian Misi yang telah ditetapkan tersebut, maka dilakukanlah survei terhadap layanan infrastruktur yang dibangun atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1.3.Profil Responden

Jumlah responden dalam survei indeks layanan infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 280 responden dengan identitas responden sebagai berikut:

a. Usia

Keadaan responden jika dilihat dari usia, terdapat 36,8% yang memiliki usia 22-40 tahun, 30,4% dengan usia 41-50 tahun, 27,9% berusia ditas 61% dan hanya 5,0% berusia 17-21 tahun. Manusia yang berada pada usia ini memiliki kedewasaan untuk menilai kondisi yang terjadi di sekitarnya, tidak terkecuali dengan kedewasaan untuk menilai Program Kukar Idaman.

Gambar 4. 3 Karakteristik Responden Menurut Usia

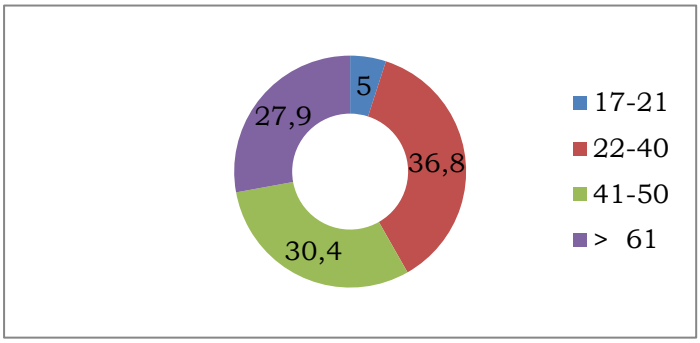

Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2022

b. Pendidikan

Dari 280 responden yang di survei, jika dilihat menurut tingkat pendidikan, 40,4% responden tingkat pendidikannya Sekolah Menengah atas (SMA/sederajat), 22,9% Sekolah Menengah Pertama (SPM/Sederajat) dan 21,4% Sekolah Dasar (SD) dan hanya 15,4% yang sarjana. Dengan demikian dilihat dari tingkat pendidikan, sesungguhnya responden sudah dapat memahami keadaan lingkungannya termaksud memahami program Kukar Idaman.

Gambar 4. 4 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan

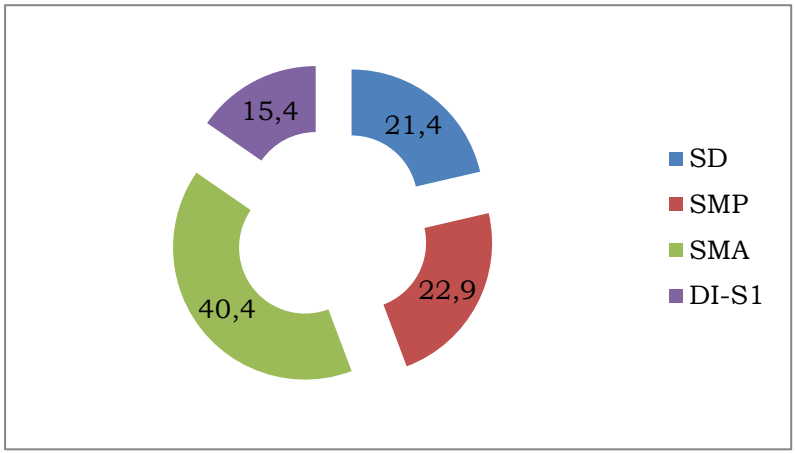

Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2022

c. Agama

Responden dilihat dari agama yang dianut, 91,5% beragama islam, 6% Kristen dan 2,5% katolik. Pada umumnya manusia yang beragama memiliki nilai-nilai spiritual yang cukup untuk memahami

dan juga memberikan penilaian yang obyektif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di sekitarnya, tidak terkecuali dengan terhadap kualitas infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 4. 5 Karakteristik Responden Menurut Agama

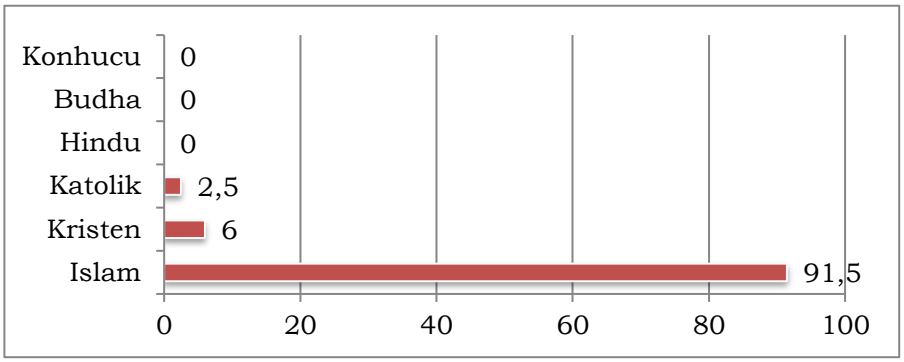

Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2022

d. Pekerjaan

Keadaan responden jika dilihat dari pekerjaan, terbesar adalah swasta/karyawan (33,6%), Ibu Rumah tangga (30%), dan Buruh/tani/nelayan (10,4%). Kondisi pekerjaan responden yang sebagian besar swasta/karyawan dan juga ibu rumah tangga, dapat dikatakan bahwa responden dengan pekerjaan tersebut lah yang akan terdampak lebih atas program-program pembangunan yang dibuat pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, pemukiman, pariwisata, dan jaringan air.

Gambar 4. 6 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

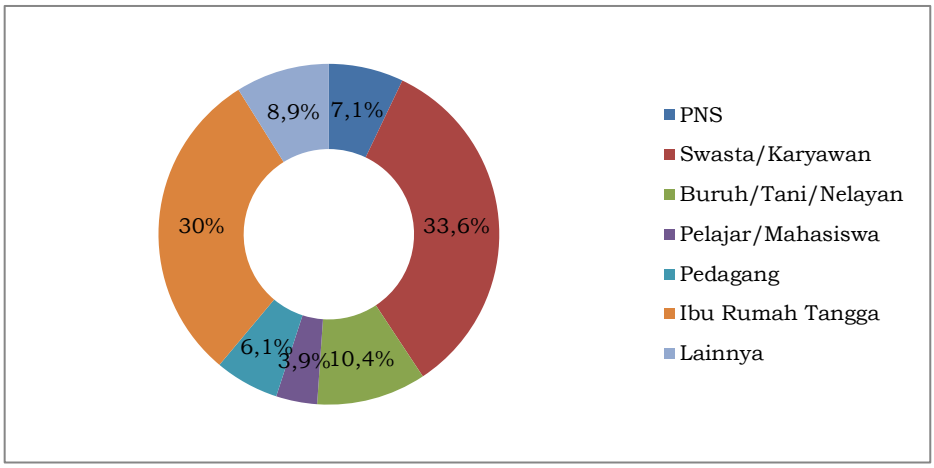

Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2022

e. Suku/ Asal Daerah

Suku terbanyak dari responden yang di survei adalah Suku Jawa (37,9%), Kutai (23,9) dan Bugis (17,5). Secara kesukuan, responden dalam penelitian ini memiliki tingkat heterogenitas kesukuan yang beragam, sehingga pemerataan pembangunan harus selalu diutamakan agar muncul rasa keadilan di mata masyarakat, tanpa terkecuali pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 4. 7 Karakteristik Responden Menurut Suku

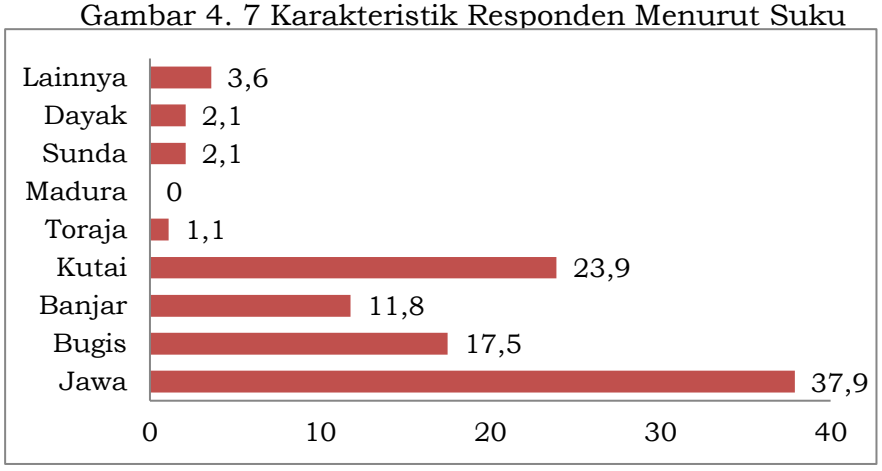

Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2022

f. Jenis Kelamin

Responden yang di survei secara persentase lebih banyak perempuan (52,1%) dibandingkan laki-laki (47,9%).

Gambar 4. 8 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

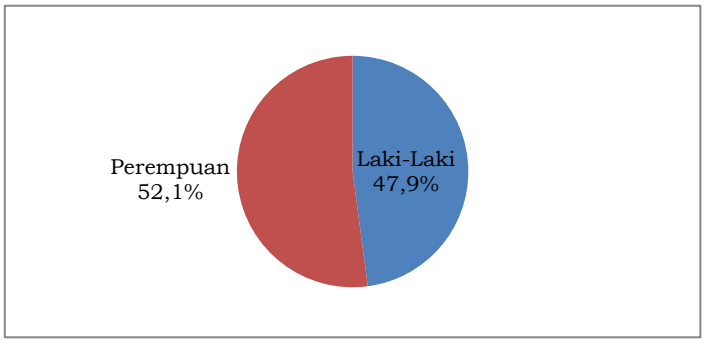

Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2022

4.2. Pembahasan

Dalam menganalisis indeks layanan infrastruktur di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan pada kewajiban dan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi infrastruktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan dan kawasan pemukiman, dengan enam indikator layanan infrastruktur yang menjadi fokus penilaian, antara lain ketersediaan, kualitas, kesesuaian, pemanfaatan, penyerapan tenaga kerja dan kontribusi ekonomi.

1. Infrastruktur Pendidikan

Pada indikator ketersediaan sarana pendidikan baik berupa PAUD, SDN, SMP atau sekolah non formal yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 65,0% menilai tersedia, 27,1% menilai sangat tersedia (lengkap), sedangkan sisanya 7,5% menilai kurang tersedia dan 0,4% menilai sangat kurang tersedia.

Gambar 4.9 Ketersediaan Sarana Pendidikan

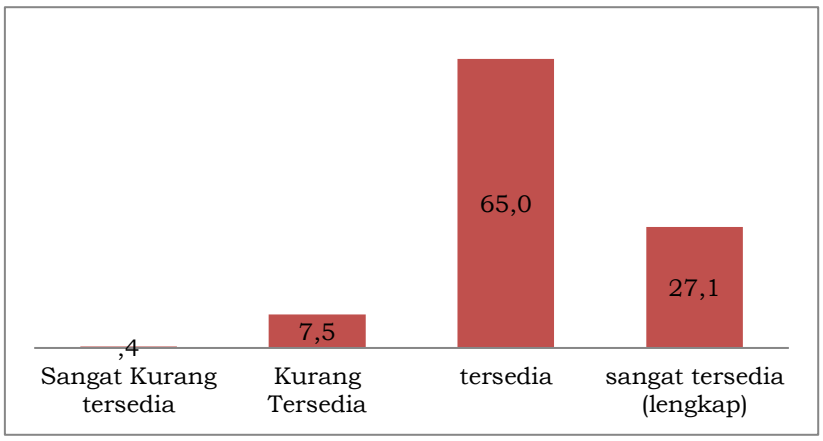

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Sementara, pada indikator kualitas sarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, sebanyak 79,3% menilai baik, 15,7% menilai sangat baik dan sisanya, 4,6% menilai kurang baik dan 0,4% menilai sangat kurang baik.

Gambar 4. 10. Kualitas Sarana Pendidikan

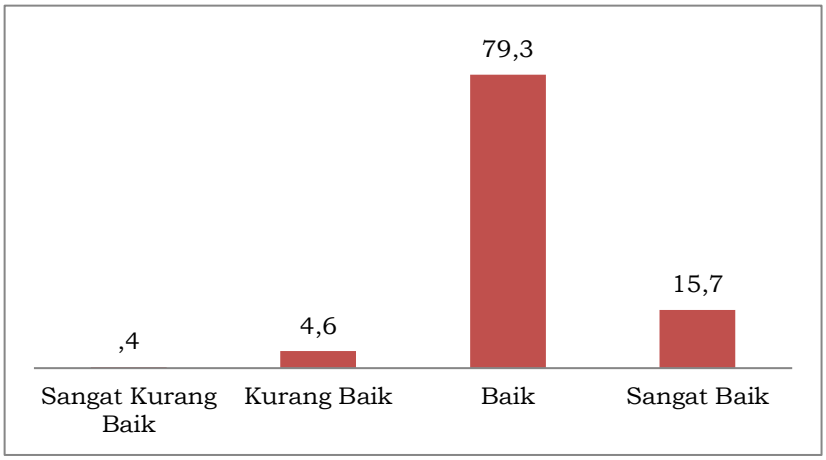

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Begitu juga pada indikator kesesuaian antara sarana pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kebutuhan masyarakat, 80,4% responden menilai menyatakan sesuai, 13,6% sangat sesuai, sedangkan sisanya 5,4% kurang sesuai dan 7% sangat tidak sesuai.

Gambar 4.11. Kesesuaian Sarana Pendidikan dengan Kebutuhan

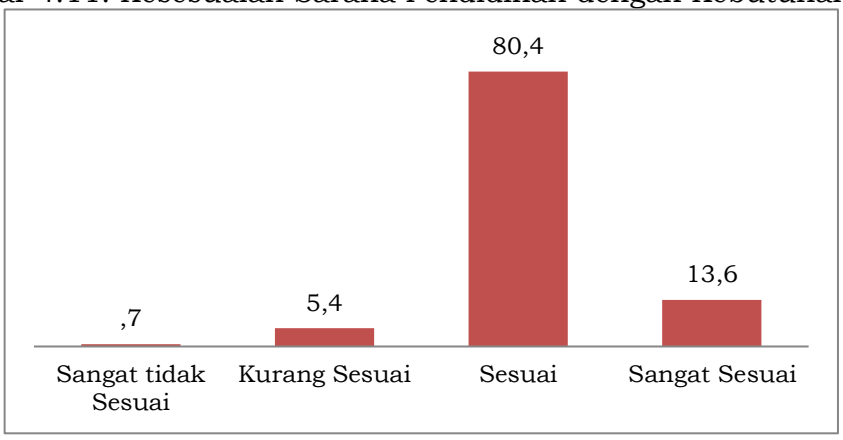

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator kemanfaatan sarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut bagi masyarakat, 72,5% menilai bermanfaat, 24,6% sangat bermanfaat, sisanya 0,7% sangat kurang bermanfaat dan hanya 2,1% yang menilai kurang bermanfaat.

Gambar 4.12. Keberadaan Sarana Pendidikan Bermanfaat Bagi Masyarakat

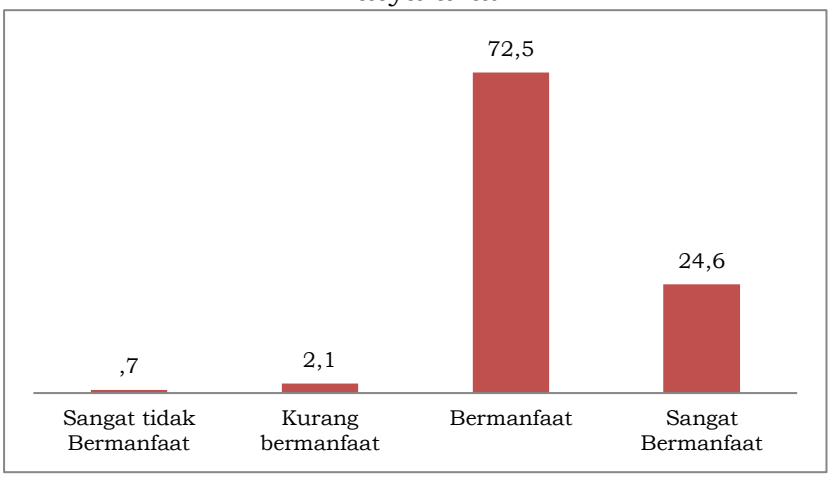

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan sarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 45% menilai melibatkan tenaga kerja lokal, 8,2% sangat melibatkan, sedangkan 38,2% menilai kurang

melibatkan tenaga kerja lokal dan 8,6% menilai sangat kurang melibatkan.

Gambar 4. 13 Pelibatan Tenaga Kerja Lokal Dalam Tahapan Pembangunan Sarana Pendidikan

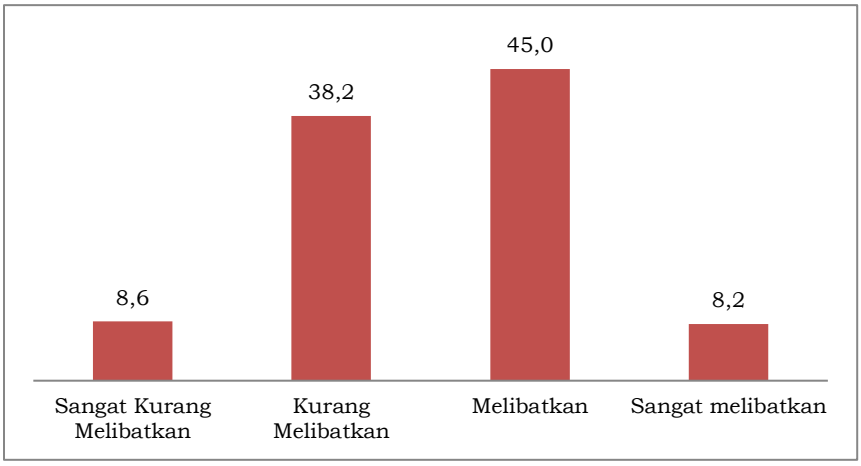

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Terakhir, pada indikator keberadaan sarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara berkontribusi bagi perekonomian masyarakat di sekitar, sebanyak 69,6% menilai berkontribusi, 15,4% sangat berkontribusi, sisanya 10,4% menyatakan kurang berkontribusi dan 4,6% sangat kurang berkontribusi.

Gambar 4.14. Keberadaan Sarana Pendidikan Berkontribusi Bagi Perekonomian Masyarakat Sekitar

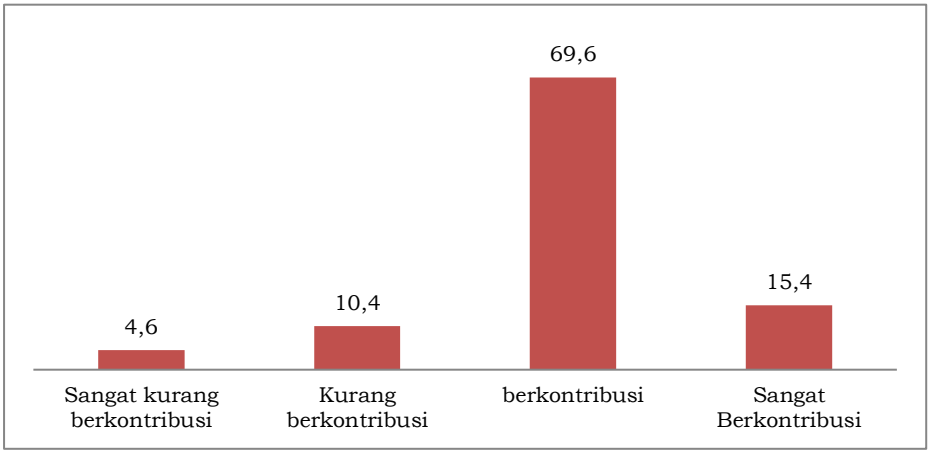

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2022

2. Infrastruktur Kesehatan

Pada indikator ketersediaan sarana kesehatan (Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Daerah) di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebanyak 75% menilai bahwa sarana kesehatan tersedia, 16,8% sangat tersedia dan sisanya 8,2% menyatakan kurang tersedia.

Gambar 4.15. Ketersediaan Sarana Kesehatan (Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Daerah)

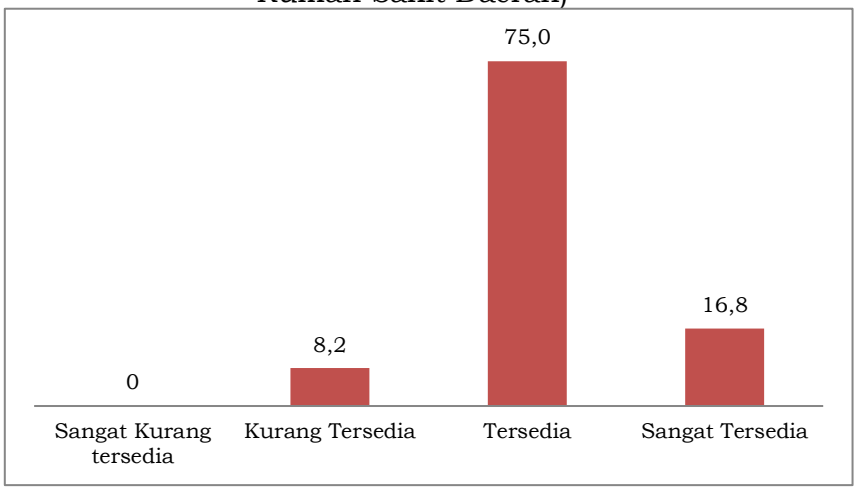

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator kualitas sarana kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, mayoritas responden atau 80,7% menilai baik, 11,4% sangat baik dan hanya 7,9% responden yang menyatakan kurang baik.

Gambar 4. 16 kualitas sarana kesehatan

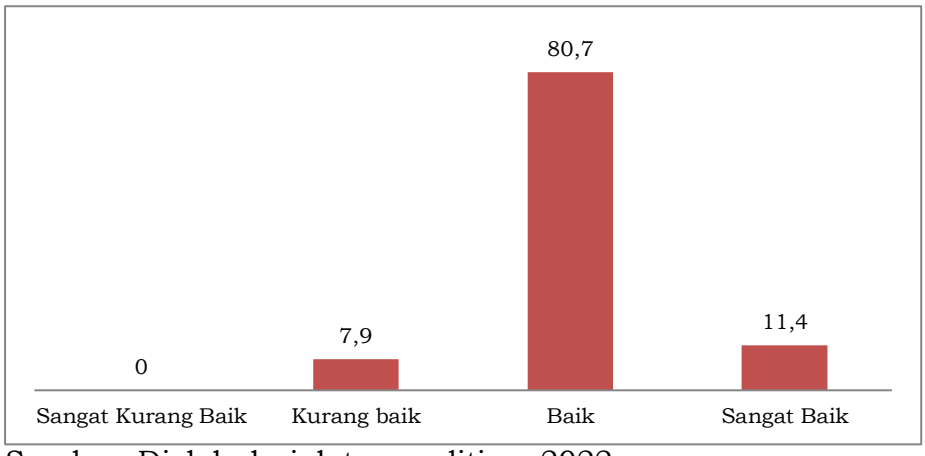

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2022

Sementara pada indikator kesesuaian sarana kesehatan dengan kebutuhan masyarakat, sebanyak 76,8% menilai sesuai, 14,3% sangat sesuai, sisanya 8,2% menyatakan kurang sesuai dan 0,7% menyatakan sangat kurang sesuai

Gambar 4.17. Kesesuaian Sarana Kesehatan Dengan Kebutuhan Masyarakat

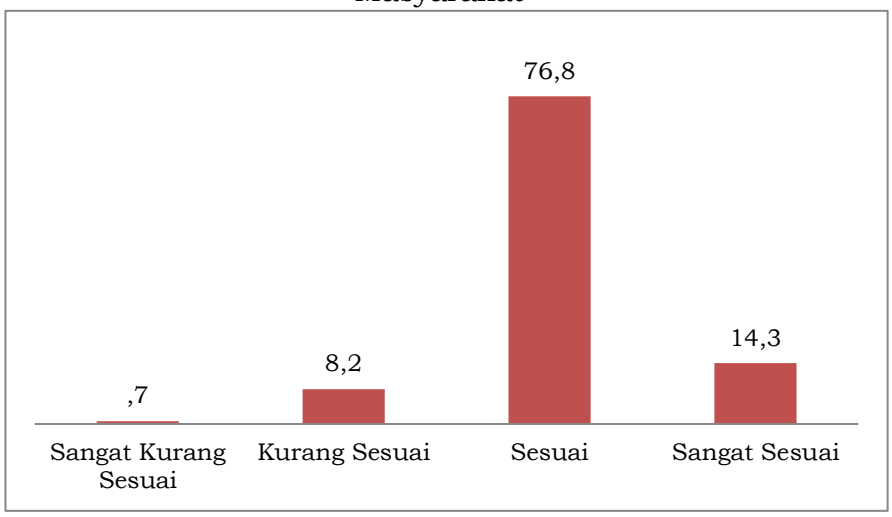

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator keberadaan sarana kesehatan bermanfaat bagi masyarakat, 73,9% menilai bermanfaat dan 22,1% sangat bermanfaat, sedangkan 3,6% menyatakan kurang bermanfaat dan 0,4% sangat kurang bermanfaat.

Gambar 4.18. Keberadaan sarana kesehatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat

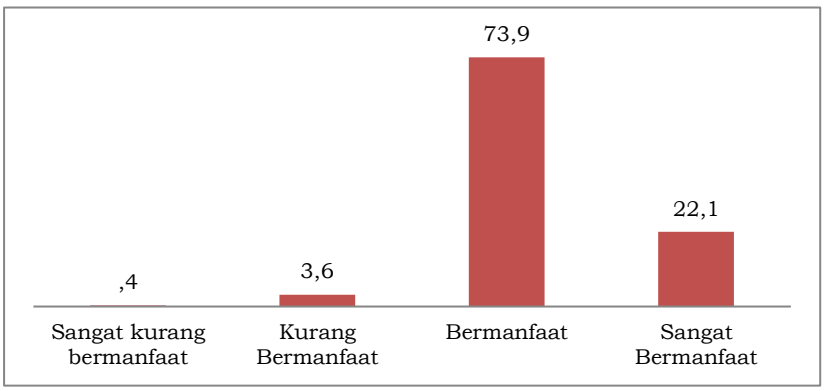

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan sarana kesehatan, 49,3% menilai melibatkan tenaga kerja lokal dan 4,6% sangat melibatkan tenaga kerja lokal, sedangkan 33,6% kurang melibatkan tenaga kerja lokal dan 12,5 sangat kurang melibatkan tenaga kerja lokal.

Gambar 4.19. Pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan sarana kesehatan

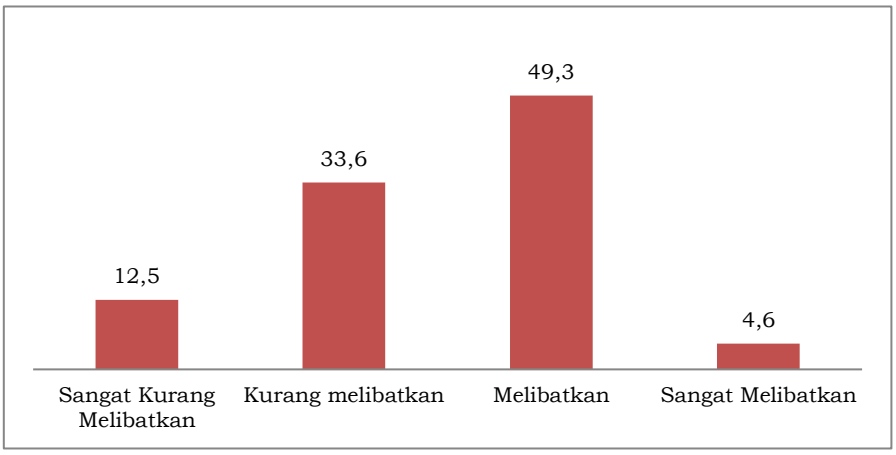

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Terakhir, pada Indikator keberadaan sarana kesehatan berkontribusi bagi perekonomian masyarakat, mayoritas responden menilai bahwa sebanyak 72,9% dan 9,6% sangat berkontribusi berkontribusi, sedangkan 10,7% menyatakan kurang berkontribusi dan 6,8% sangat kurang berkontribusi.

Gambar 4.20. Sarana Kesehatan Tersebut, Apakah Berkontribusi Bagi Perekonomian Masyarakat Sekitar

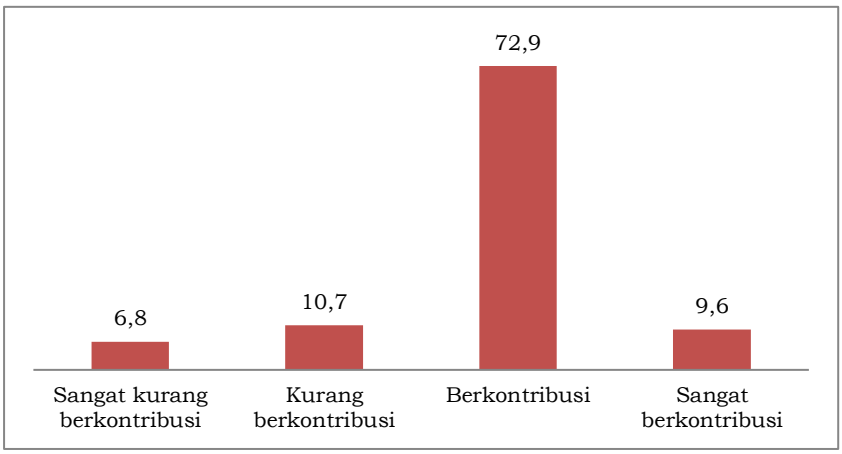

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

3. Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Konektifitas)

Pada indikator ketersediaan jalan dan/atau jembatan penghubung antar desa dan antar kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, mayoritas responden menilai atau 76,4% menyatakan tersedia, 15, 7% sangat tersedia, sedangkan sisanya 7,5% menyatakan kurang tersedia dan 0,4% sangat kurang tersedia.

Gambar 4. 21. ketersediaan jalan dan/atau jembatan penghubung

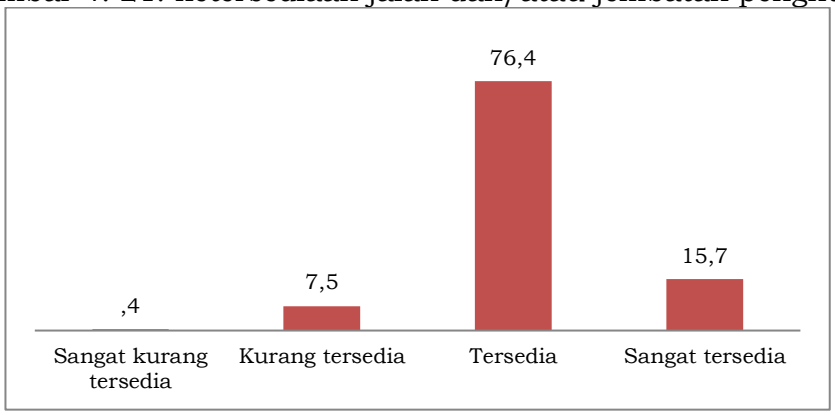

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Selanjutnya pada indikator kualitas jalan dan/atau jembatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, 60,7% responden menilai berkualitas dan 11,4% sangat berkualitas, sedangkan sisanya 26,1% menyatakan kurang berkualitas dan 1,8% sangat kurang berkualitas.

Gambar 4.22. Kualitas Jalan dan/atau Jembatan

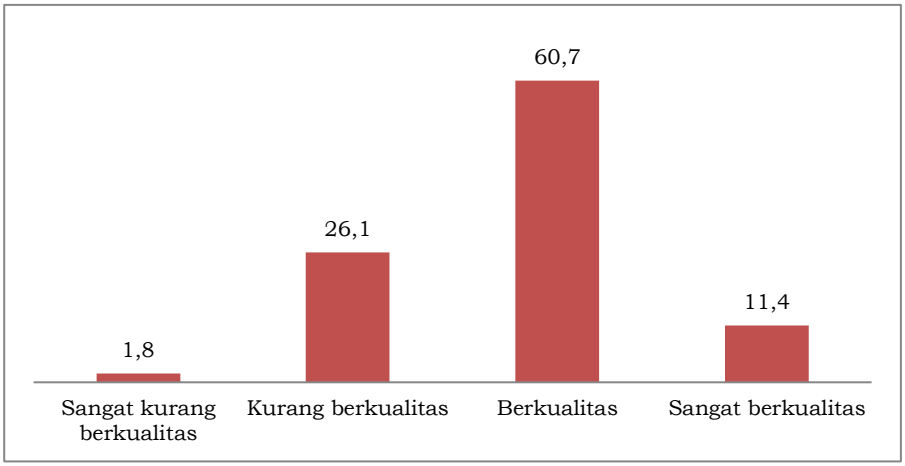

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator kesesuaian jalan dan jembatan dengan kebutuhan masyarakat, hasil penelitian menunjukan bahwa 73,2% responden

menilai sesuai dan 11,1% menyatakan sangat sesuai, sedangkan sisnya 15,0% kurang sesuai, dan 0,7% sangat kurang sesuai.

Gambar 4. 23. Kesesuaian Jalan dan/atau Jembatan dengan Kebutuhan Masyarakat

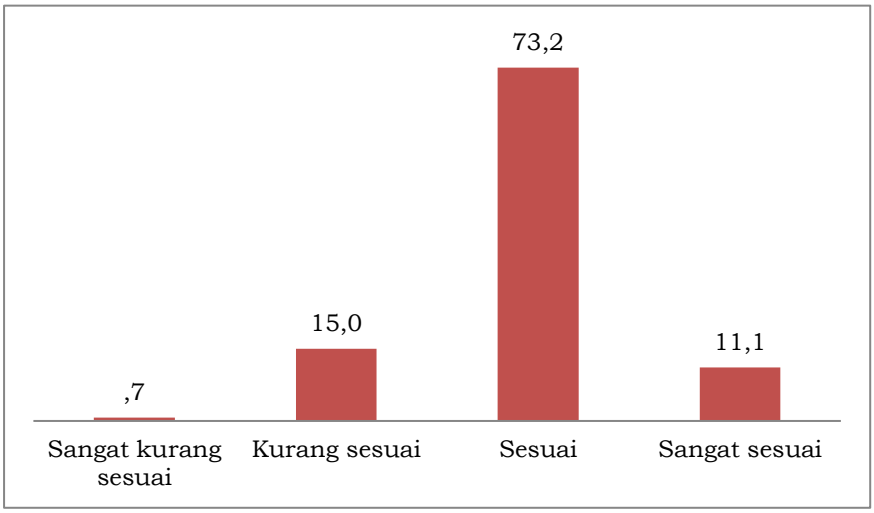

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Selanjutnya, indikator keberadaan jalan dan jembatan bermanfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa 76,1% responden menilai bermanfaat, 20,4% sangat bermanfaat, dan sisanya 3,6% menyatakan kurang bermanfaat.

Gambar 4.24.Keberadaan Jalan dan/atau Jembatan Bermanfaat bagi Masyarakat

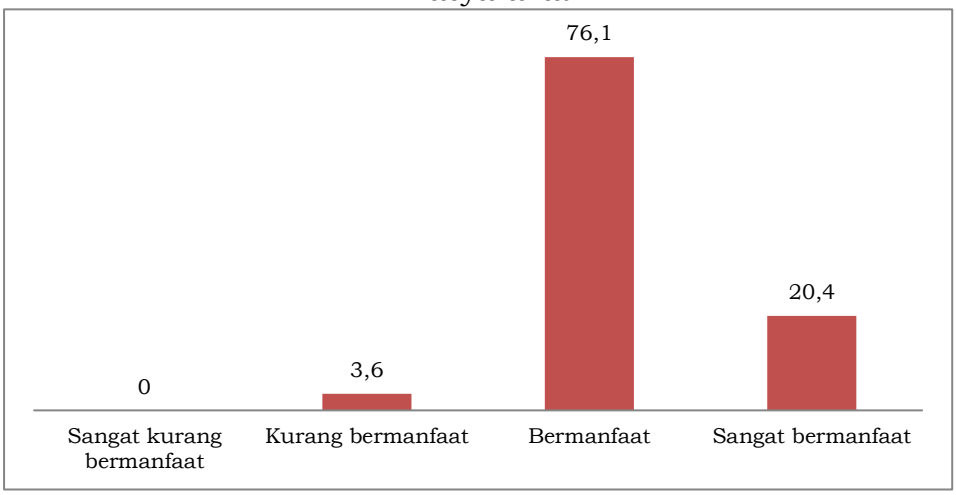

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, hasil penelitian menunjukan bahwa 42,9% responden menilai belum melibatkan tenaga kerja lokal dan 8,6% menyatakan sangat melibatkan, sedangkan 36,8% menyatakan kurang melibatkan dan 11,8% sangat kurang melibatkan.

Gambar 4.25. Pelibatan Tenaga Kerja Lokal Dalam Tahapan Pembangunan Jalan Dan Jembatan

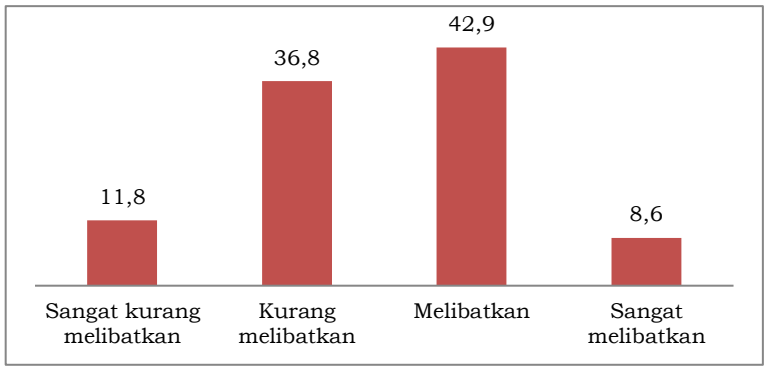

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator keberadaan jalan dan jembatan berkontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar, hasil penelitian menunjukan bahwa 72,1% responden menilai berkontribusi dan 18,6% sangat berkontribusi, sedangkan 5,4% menyatakan kurang berkontribusi dan 3,9% sangat kurang berkontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Gambar 4.26. Keberadaan Jalan dan Jembatan Berkontribusi Bagi Perekonomian Masyarakat Sekitar

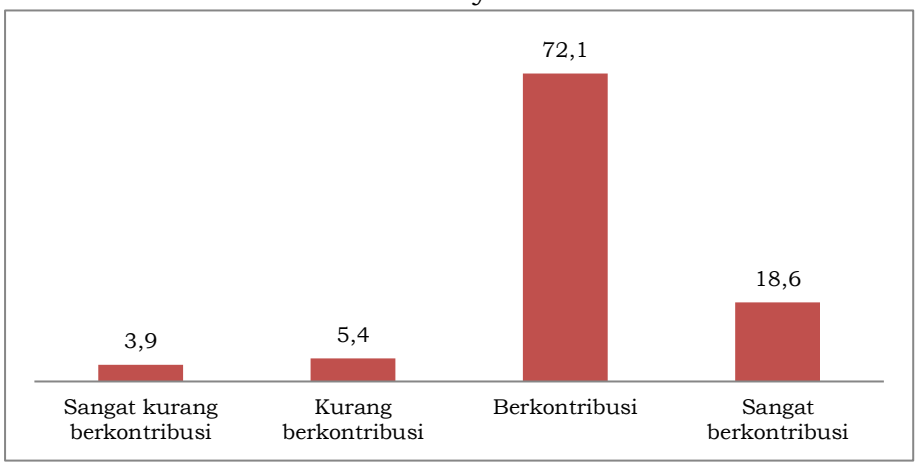

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

4. Infrastruktur Embung dan Irigasi Pertanian

Untuk pertanyaan terkait dengan infrastruktur pertanian khususnya embung dan irigasi hanya ditujukan pada responden pada wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan pertanian yaitu Sebulu, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Loa Kulu dan Muara Badak.

Berdasarkan hasil penelitian, pada indikator ketersediaan embung dan/atau irigasi pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara, menunjukan bahwa hanya 43,57% menyatakan tersedia sedangkan 46,43% responden menilai kurang tersedia dan 10% menyatakan sangat kurang tersedia.

Gambar 4.27. Ketersediaan Embung dan/Atau Irigasi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara

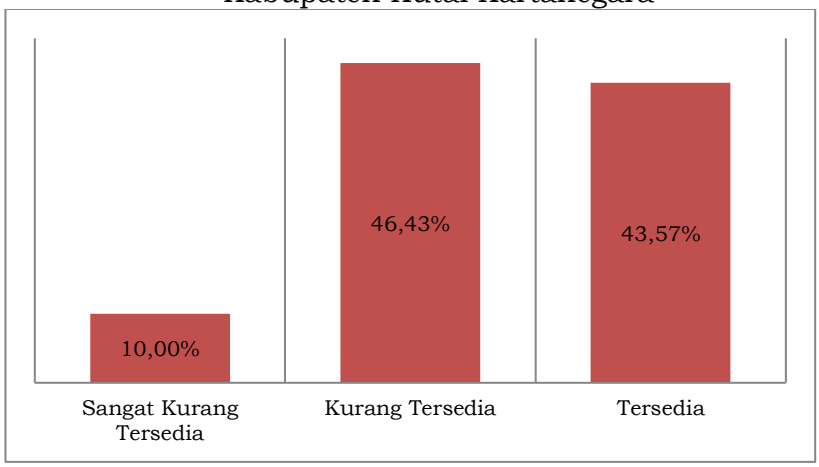

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator kualitas embung dan/atau irigasi yang tersedia, hanya 35,71% yang menyatakan berkualitas, sedangkan sisanya 53,57% responden menilai kurang berkualitas dan 10,71 % menyatakan sangat kurang berkualitas.

Gambar 4.28. Kualitas Embung dan/atau Irigasi

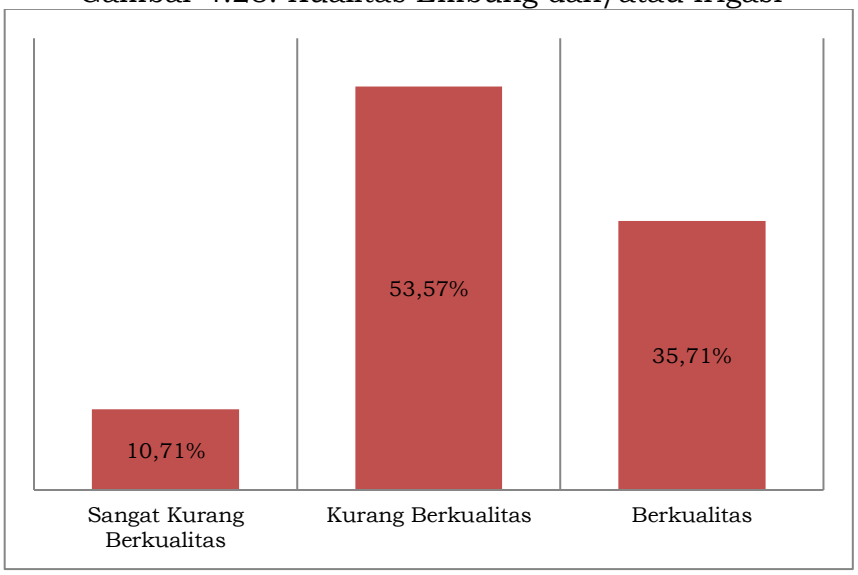

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Selanjutnya, pada indikator kesesuaian embung dan/atau irigasi dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menemukan hanya 40% responden yang menilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat/ petani, sedangkan mayoritas atau 50% responden menilai embung dan/atau irigasi tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 10% sangat kurang sesuai.

Gambar 4.29. Kesesuaian Embung dan/atau Irigasi dengan Kebutuhan Masyarakat

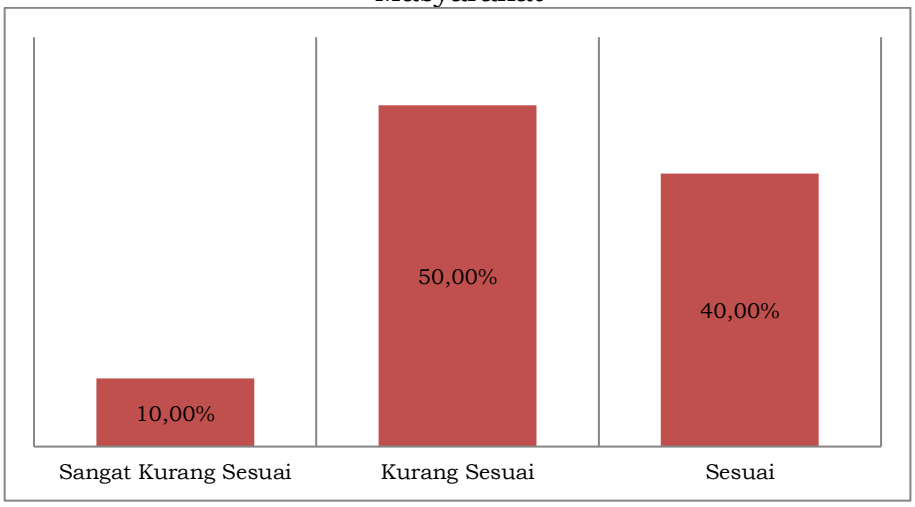

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator keberadaan embung dan/atau irigasi bermanfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 46,43%

responden menyatakan bermanfaat dan 0,71% responden menyatakan sangat bermanfaat, sedangkan 42,86% menyatakan kurang bermanfaat dan 10% menyatakan sangat kurang bermanfaat.

Gambar 4.30. Keberadaan embung dan/atau irigasi bermanfaat bagi masyarakat

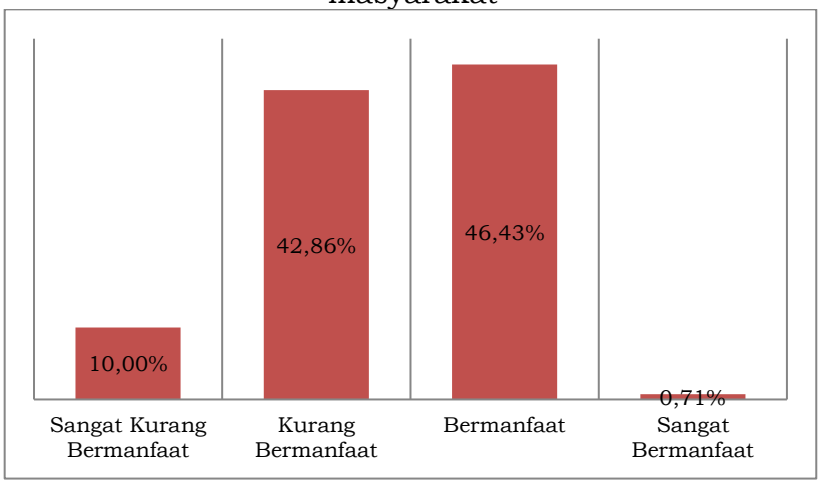

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan embung dan/atau irigasi. Berdasarkan hasil penelitian hanya 40% responden yang menyatakan melibatkan dan 1,43% menyatakan sangat melibatkan, sedangkan 45% menilai kurang melibatkan tenaga kerja lokal dan 13,57 % sangat kurang melibatkan.

Gambar 4.31. Pelibatan Tenaga Kerja Lokal Dalam Tahapan Pembangunan Embung dan/atau Irigasi

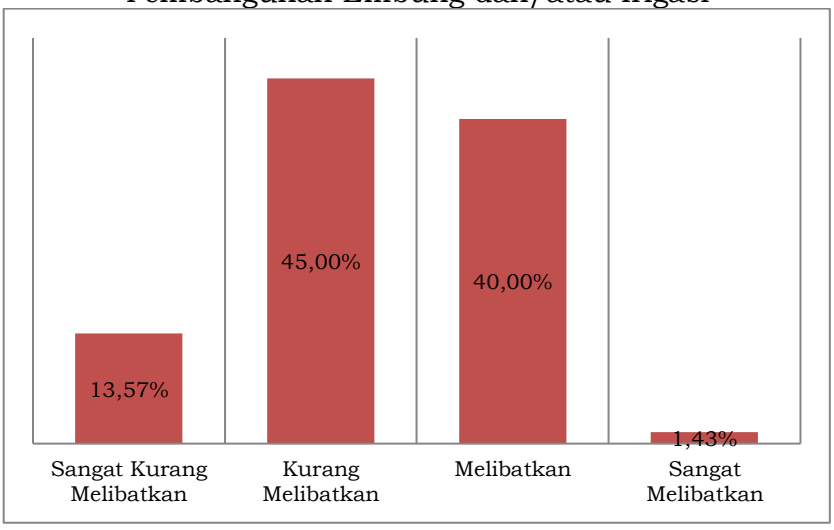

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Terakhir, indikator Keberadaan Embung dan/atau irigasi berkontribusi bagi perekonomian petani. Hasil penelitian menunjukan bahwa embung dan/atau irigasi tersebut berkontribusi bagi perekonomian sebanyak 52,14% dan 2,14% menyatakan sangat berkontribusi, sedangkan sisanya 39,29% menyatakan kurang berkontribusi dan 6,43% menyatakan sangat kurang berkontribusi.

Gambar 4.32. Keberadaan Embung dan/atau Irigasi Berkontribusi bagi Perekonomian Petani

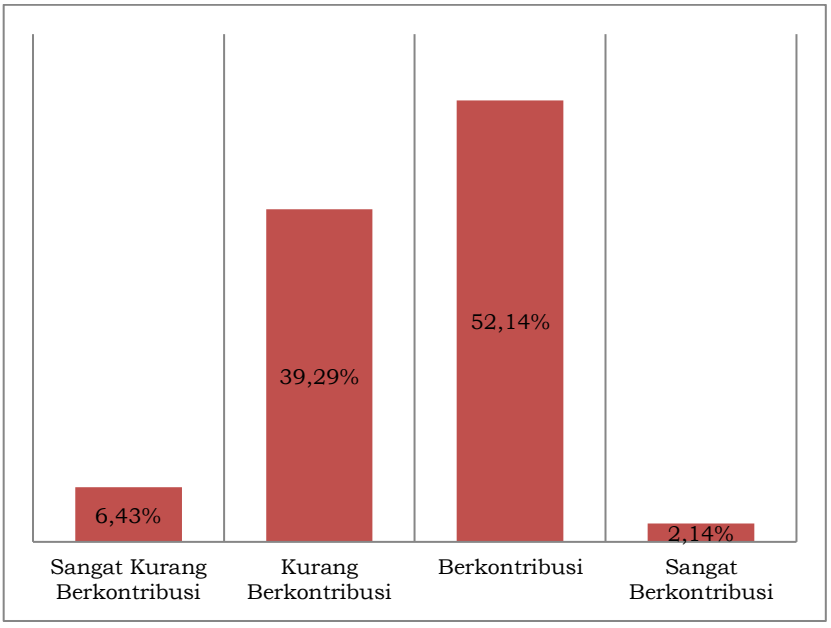

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

5. Infrastruktur Jaringan Air Bersih

Dari indikator ketersediaan jaringan air bersih diperumahan atau pemukiman di tempat tinggal warga. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 76,1% tersedia, 16,4% sangat tersedia, dan hanya 7,5% yang kurang tersedia.

Gambar 4.33. Ketersediaan Jaringan Air Bersih diperumahan atau Pemukiman di Tempat Tinggal Warga

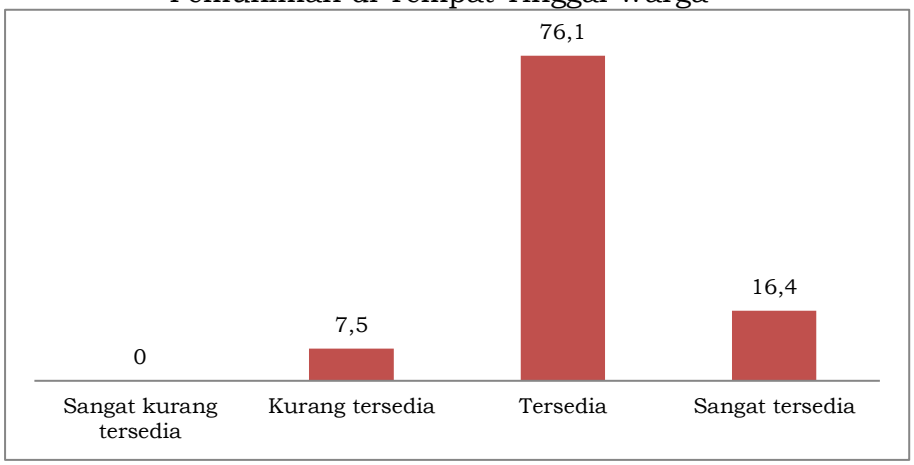

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Selanjutnya, pada indikator kualitas air bersih yang tersedia diperumahan/pemukiman warga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sebanyak 75,4% berkualitas, 13,9% yang kurang berkualitas, 10,4% sangat berkualitas dan 0,4% sangat kurang berkualitas.

Gambar 4.34. Kualitas Air Bersih yang Tersedia diperumahan/Pemukiman Warga

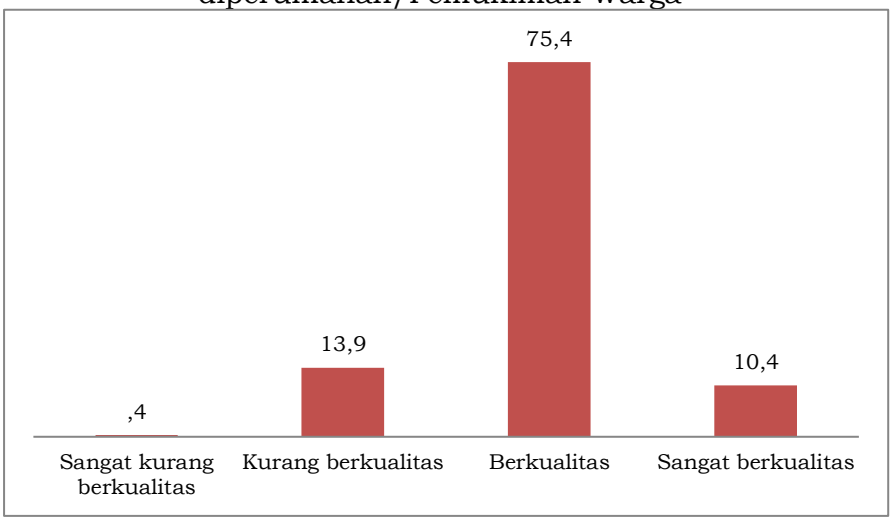

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator kesesuaian air bersih yang diterima dengan kebutuhan masyarakat, diperoleh hasil bahwa mayoritas responden menilai bahwa 68,6% air bersih yang diterima sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, 17,5 kurang sesuai, 13,6 sangat sesuai dan sangat kurang sesuai 0,4%.

Gambar 4.35. Kesesuaian Air Bersih yang diterima dengan Kebutuhan Masyarakat

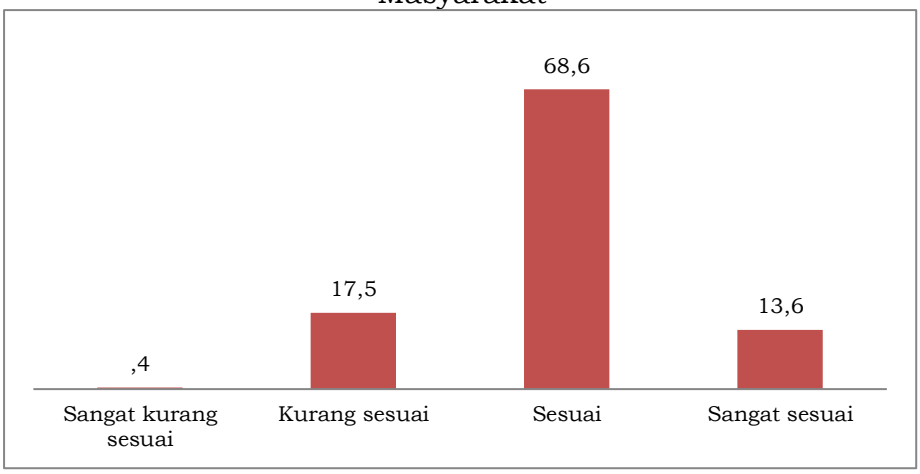

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Sementara, pada indikator keberadaan jaringan air bersih bermanfaat bagi masyarakat, berdasarkan penelitian yang dilakukan menemukan bahwa 74,6% jaringan air bersih tersebut bermanfaat, 22,1% sangat bermanfaat, dan hanya 3,2% kurang bermanfaat.

Gambar 4. 36. Keberadaan Jaringan Air Bersih Bermanfaat Bagi Masyarakat

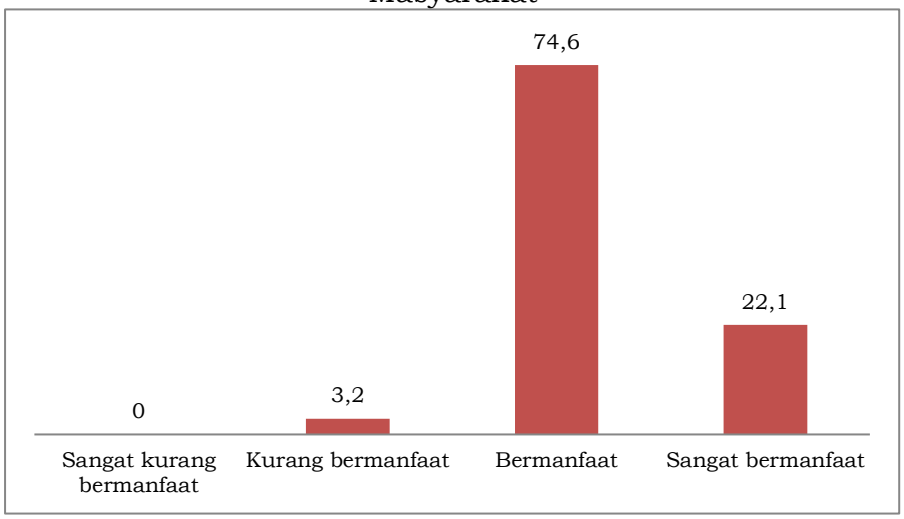

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahap pembangunan jaringan air bersih, didapatkan hasil bahwa 43,6% tenaga

kerja lokal kurang dilibatkan, tapi ada 35,4% yang terlibat, 13,2% sangat kurang terlibat dan 7,9% sangat terlibat.

Gambar 4.37. Pelibatan Tenaga Kerja Lokal Dalam Tahap Pembangunan Jaringan Air Bersih

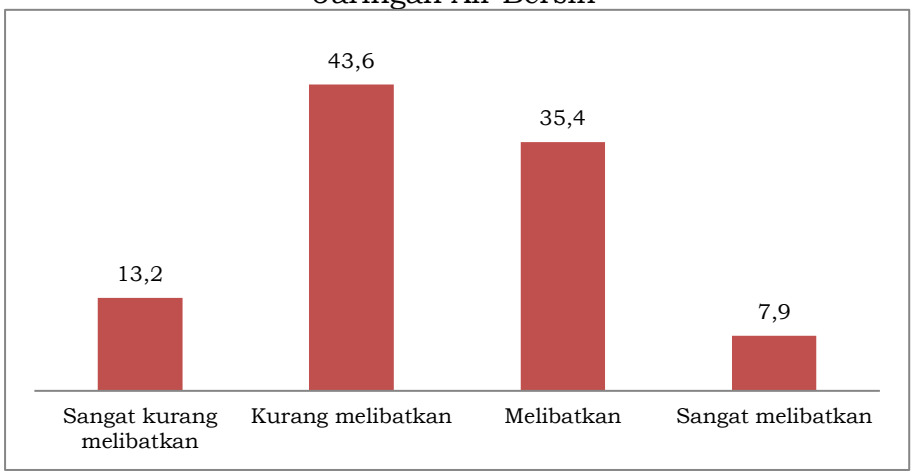

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Terakhir, indikator keberadaan jaringan air bersih mampu mengatasi masalah ke kurangan air bersih. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden menilai bahwa jaringan air bersih mampu mengatasi masalah kekurangan air yang dihadapi warga sebesar 73,2%, sangat mampu 15,4, kurang mampu 11,1% dan sangat kurang mampuh sebesar 0,4%.

Gambar 4.38. Keberadaan Jaringan air bersih Mampu Mengatasi Masalah ke Kurangan Air Bersih

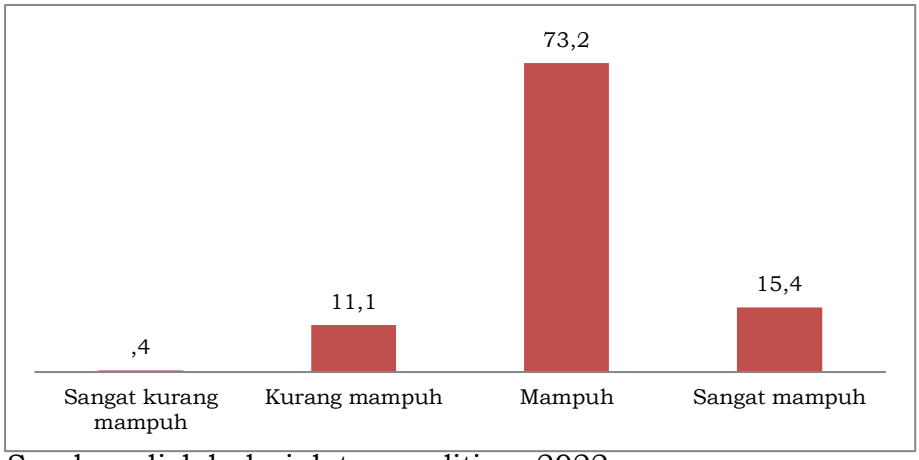

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

6. Infrastruktur Drainase/Parit Perumahan/Pemukiman

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator ketersediaan drainase/parit perumahan atau pemukiman warga, didapatkan hasil bahwa 60% tersedia, 26,4 kurang tersedia, 7,5% sangat tersedia, dan 6,1% sangat kurang tersedia.

Gambar 4.39. Ketersediaan Drainase/Parit Perumahan atau Pemukiman Warga

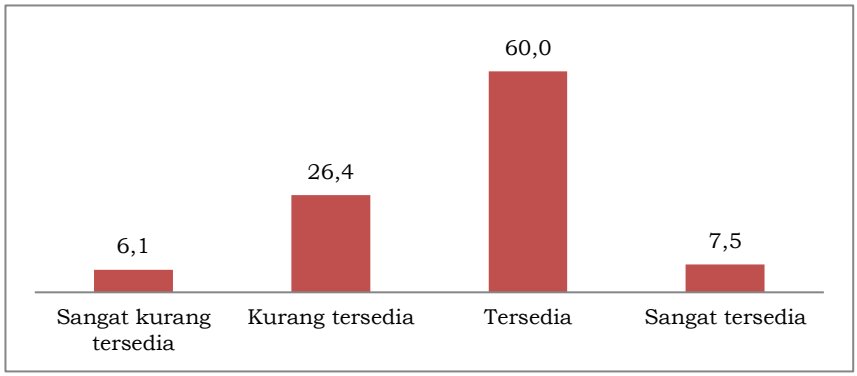

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Selanjutnya, pada indikator kualitas drainase/parit perumahan/pemukiman. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 49,6 responden menilai berkualitas, 37,9 kurang berkualitas, 6,8 sangat kurang berkualitas dan 5,7% sangat berkualitas

Gambar 4.40. Kualitas Drainase/Parit Perumahan/Pemukiman

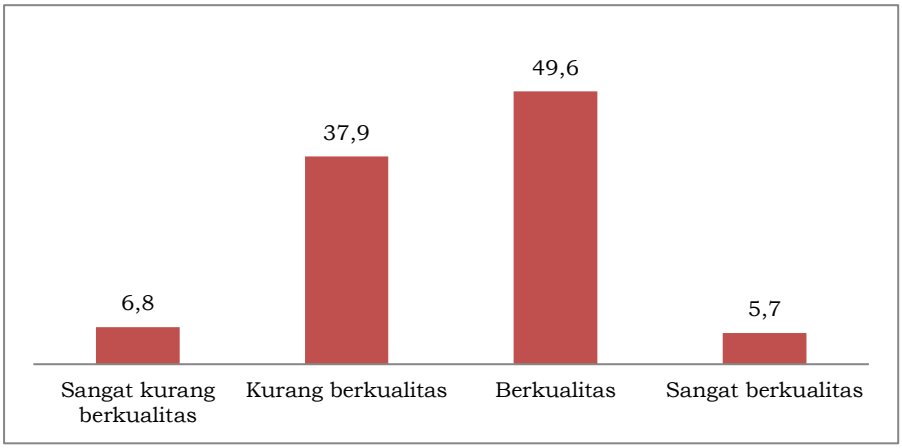

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator kesesuaian drainase/parit perumahan/pemukiman terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan

hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 55% menunjukan sesuai, 30% kurang sesuai, 7,5% sesuai dan 6,8% sangat kurang sesuai.

Gambar 4.41. Kesesuaian drainase/parit perumahan/pemukiman terhadap kebutuhan masyarakat

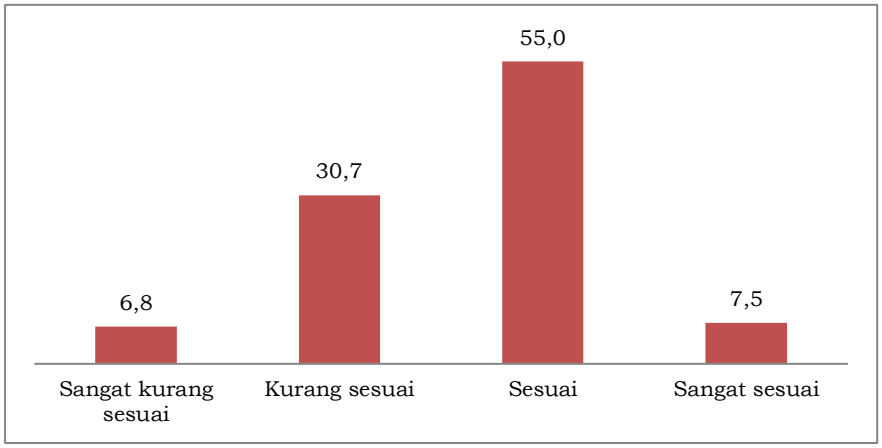

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator berikutnya, yaitu keberadaan drainase/parit perumahan/pemukiman bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 64,6% responden menilai drainase/parit perumahan/pemukiman tersebut bermanfaat, 17,5% kurang bermanfaat, 11,8% sangat bermanfaat dan 6,1% sangat kurang bermanfaat.

Gambar 4.42. Keberadaan drainase/parit perumahan/pemukiman bermanfaat bagi masyarakat

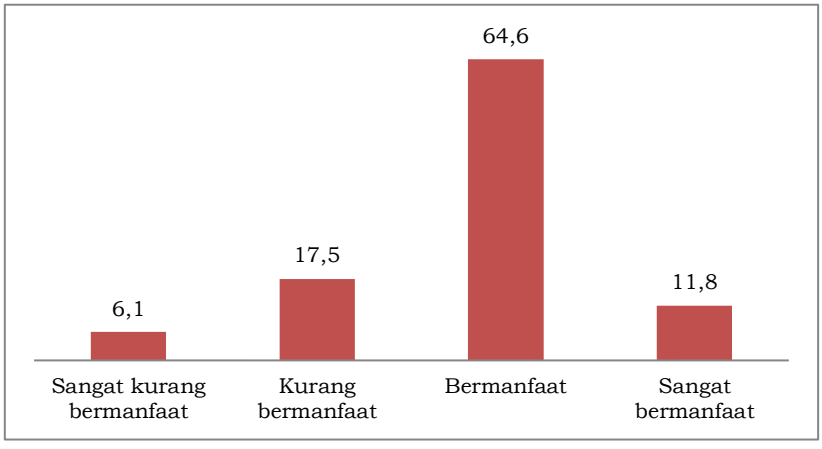

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Selanjutnya, pada indikator pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan drainase/parit perumahan/pemukiman. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa sebanyak 42,1% responden menilai melibatkan, 36,4% kurang melibatkan, 13,2% sangat kurang melibatkan dan 8,2% sangat melibatkan.

Gambar 4. 43. Pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan drainase/parit perumahan/pemukiman

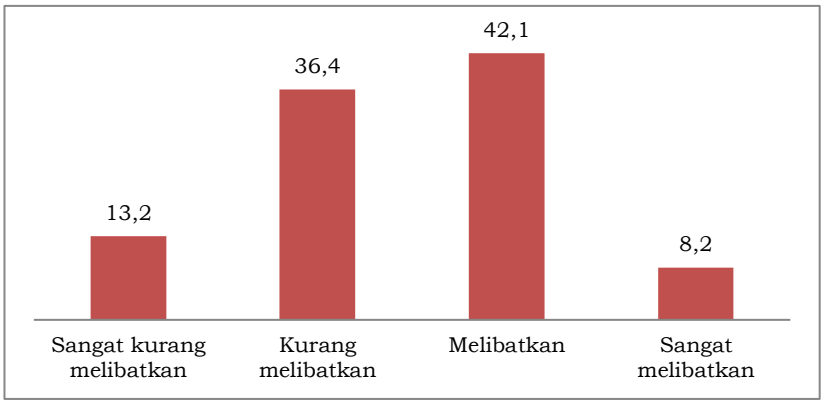

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Terakhir, pada indikator keberadaan drainase/parit mampu mencegah terjadinya banjir/genangan, hasil penelitian menunjukan bahwa 55,4% responden menilai mampu mencegah terjadinya banjir atau genangan, 26,8% kurang mampu, 10,4% sangat mampu dan 7,5% sangat kurang mampu.

Gambar 4.44. Keberadaan drainase/parit mampu mencegah terjadinya banjir/genangan

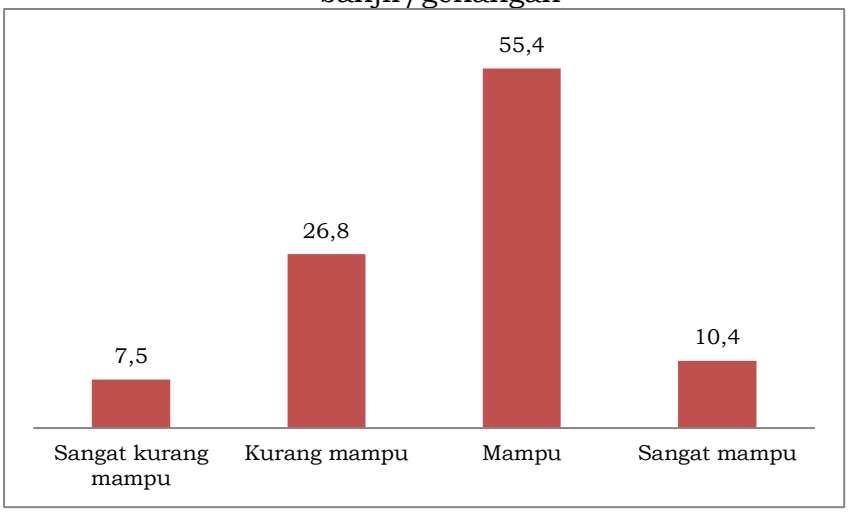

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

7. Infrastruktur Layanan Persampahan (Tempat Pembuangan Sampah Sementara dan Angkutan Persampahan)

Pada indikator kesetersediaan layanan persampahan di perumahan/pemukiman di tempat tinggal warga. Berdasarkan hasil penelitian 57,9 responden menilai layanan persampahan sudah ada diperumahan/pemukiman tempat tinggal warga, 24,6% kurang tersedia, 11,4% sangat tersedia dan 6,1% sangat kurang tersedia.

Gambar 4. 45. Kesetersediaan layanan persampahan diperumahan/pemukiman ditempat tinggal warga

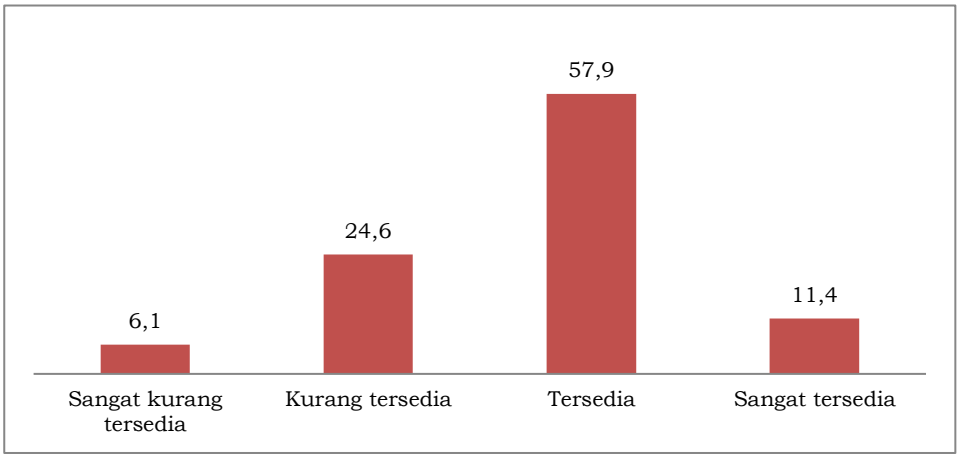

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator kualitas layanan persampahan diperumahan/pemukiman tempat tinggal warga. Berdasarkan hasil penelitian 58,6% responden menilain bahwa layanan persampahan perumahan/pemukiman tempat tinggal warga sudah berkualitas, 32,9% kurang berkualitas, 5,0% sangat berkualitas dan 3,6% sangat kurang berkualitas.

Gambar 4. 46. Kualitas layanan persampahan diperumahan/pemukiman tempat tinggal warga

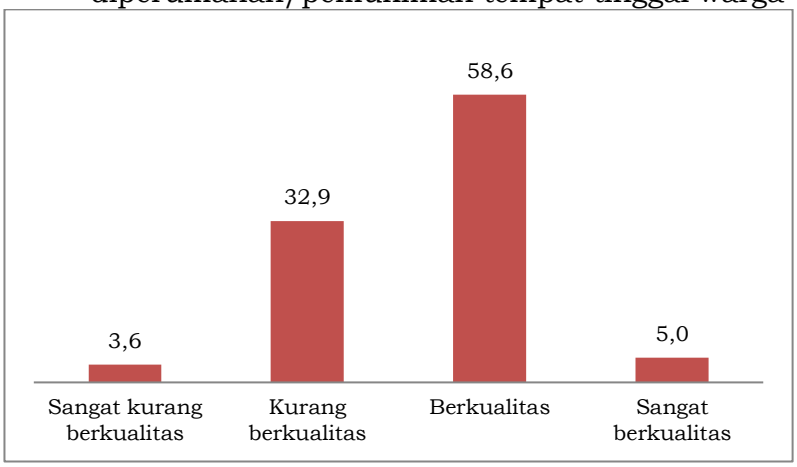

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Selanjutnya, pada indikator kesesuaian layanan persampahan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 60,4% responden menilai sesuai, 30,4 kurang sesuai, 4,6% sangat sesuai dan sangat kurang sesuai.

Gambar 4. 47. Kesesuaian layanan persampahan dengan kebutuhan masyarakat

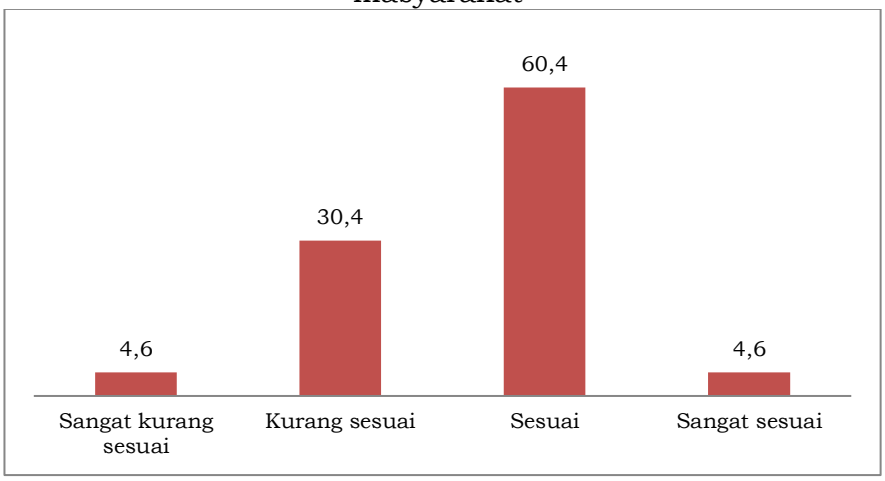

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator keberadaan layanan persampahan bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa 61,1% responden menilai bermanfaat, 17,9% kurang bermanfaat, 17,5% sangat bermanfaat, dan 3,6% sangat kurang bermanfaat.

Gambar 4. 48. Keberadaan layanan persampahan bermanfaat bagi masyarakat

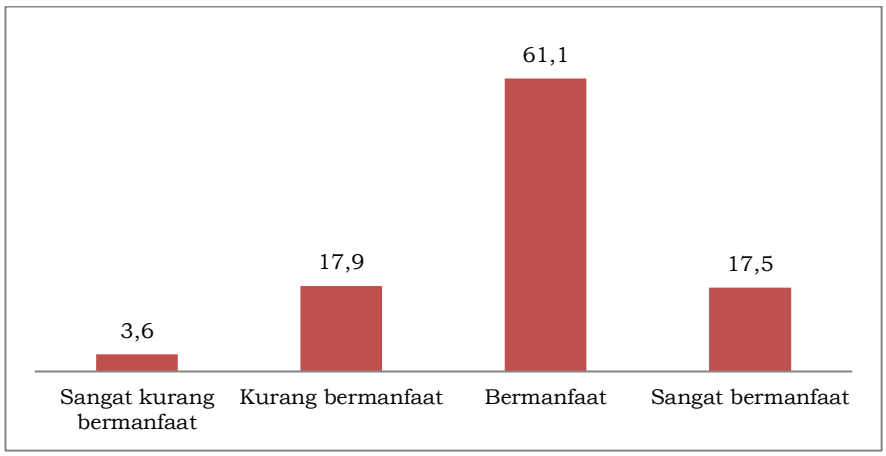

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Sedangkan untuk indikator pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan layanan persampahan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 37,1% melibatkan, 37,1% kurang melibatkan, 15,7% sangat kurang melibatkan dan 10% sangat melibatkan

Gambar 4. 49. Pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan layanan persampahan

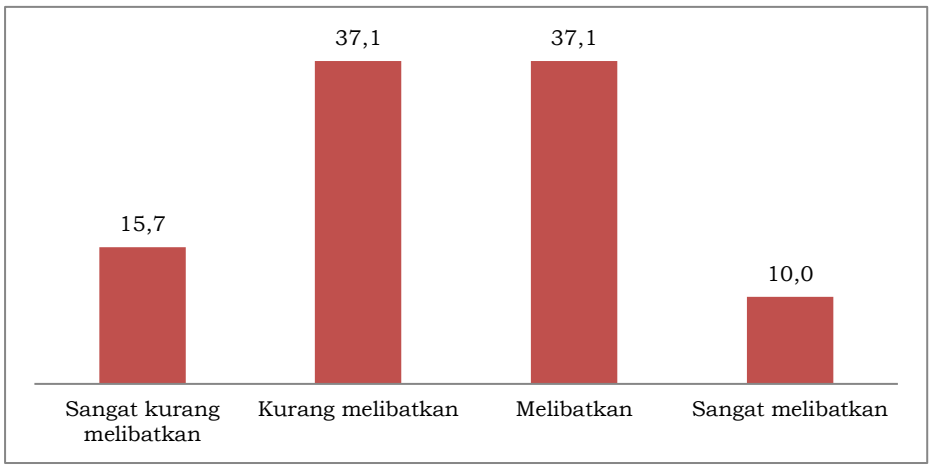

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Terakhir pada indikator keberadaan layanan persampahan mampu mencegah banjir dan permasalahan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan menunjukan bahwa 61,4% mampu mencegah banjir dan permasalahan lingkungan, 24,3% kurang mampu, 10% sangat mampu, dan 4,3% sangat kurang mampu.

Gambar 4. 50. Keberadaan layanan persampahan mampu mencegah banjir dan permasalahan lingkungan

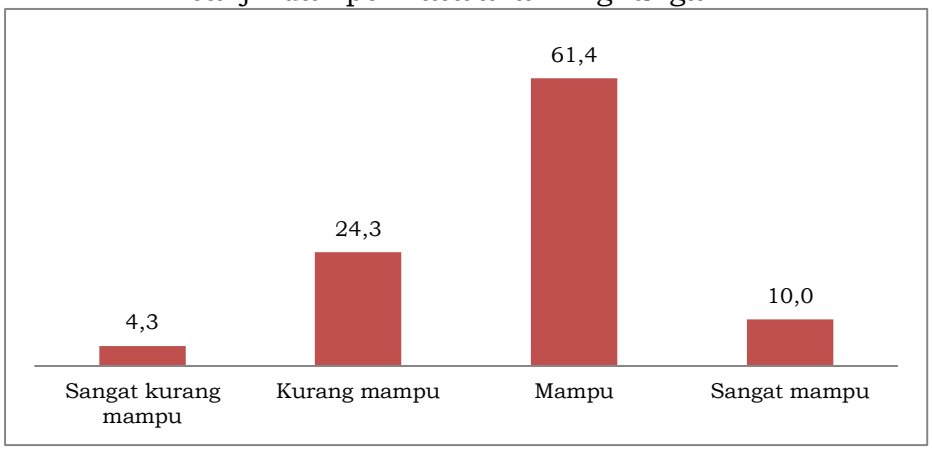

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

8. Infrastruktur Pasar

Pada indikator, ketersediaan pasar di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 66,1% responden menilai tersedia pasar, 18,2% kurang tersedia, 15% sangat tersedia dan 0,7% sangat kurang tersedia.

Gambar 4. 51. Ketersediaan pasar di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

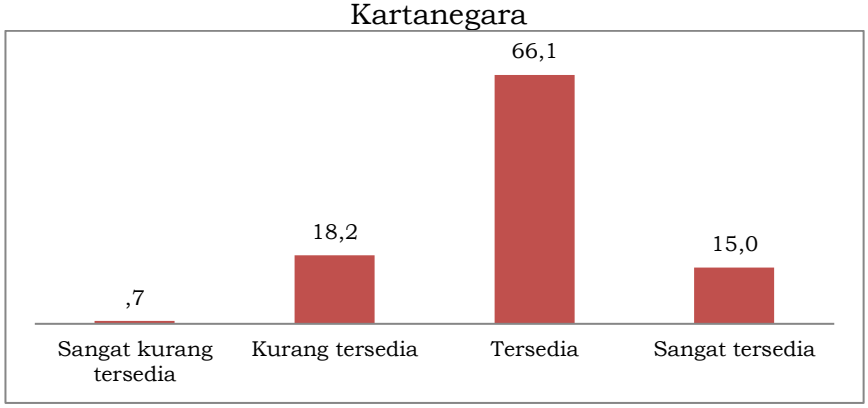

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator kualitas bangunan pasar, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 63,2% bangunan pasar berkualitas, 28,6% kurang berkualitas, 7,5% sangat berkualitas dan hanya 0,7 sangat kurang berkualitas.

Gambar 4. 52. Kualitas Bangunan Pasar

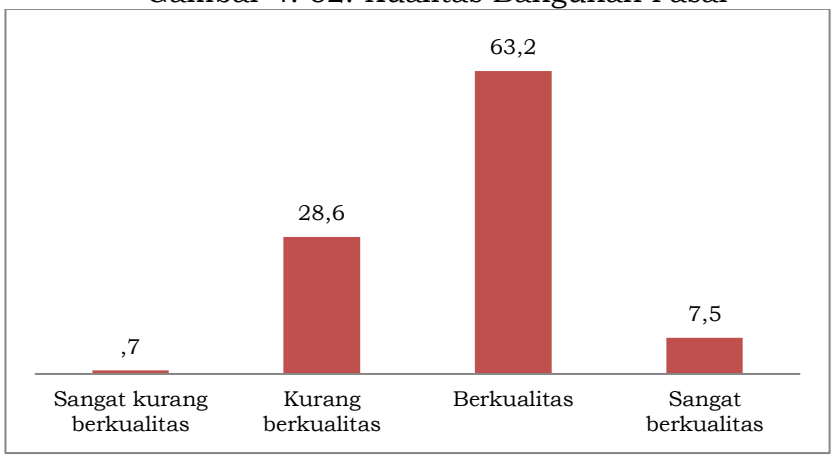

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Selanjutnya, pada indikator kesesuaian bangunan pasar dengan kebutuhan masyarakat, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 66,8% responden menilai sesuai, 21,1% kurang sesuai, 11,4% sangat sesuai dan hanya 0,7% sangat kurang sesuai

Gambar 4. 53. Kesesuaian bangunan pasar dengan kebutuhan masyarakat

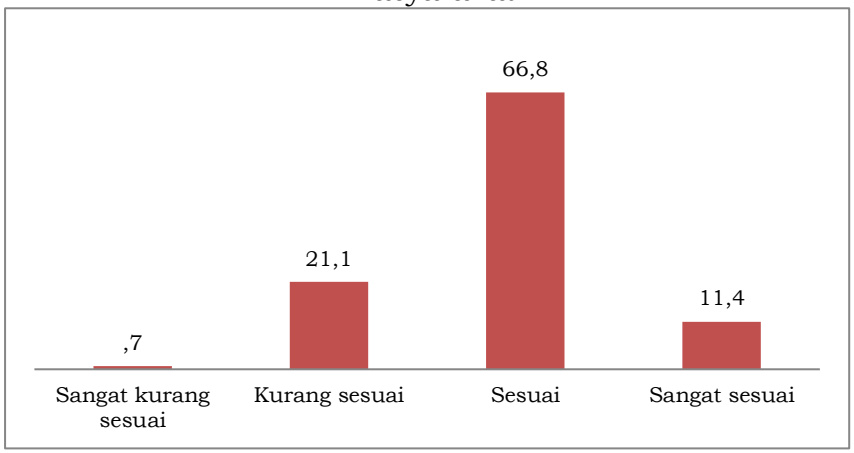

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator keberadaan pasar bermanfaat bagi masyarakat, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 62,5% keberadaan pasar tersebut bermanfaat, 21,4% sangat bermanfaat, 15,7% kurang bermanfaat dan 0,4% sangat kurang bermanfaat.

Gambar 4. 54. Keberadaan pasar bermanfaat bagi masyarakat

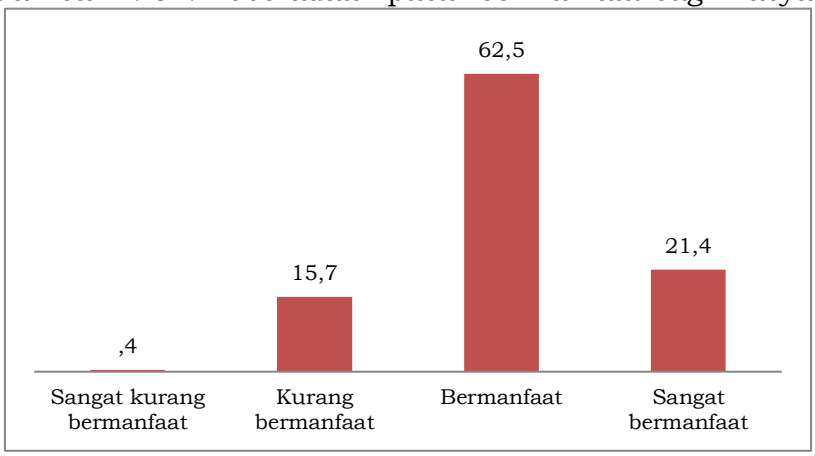

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan pasar, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 43,2% melibatkan tenaga kerja lokal, 36,4% kurang melibatkan, 11.1% sangat kurang melibatkan dan 9,3% sangat melibatkan.

Gambar 4. 55. Pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan pasar

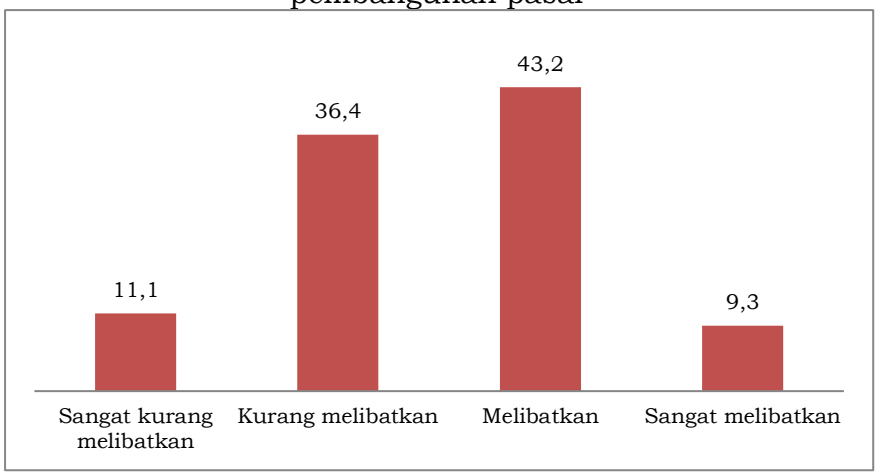

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Terakhir pada indikator keberadaan pasar berkontribusi bagi perekonomian masyarakat, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 58,9% berkontribusi, 23,2% sangat berkontribusi dan 17,1% kurang berkontribusi dan 0,7% sangat kurang berkontribusi.

Gambar 4. 56. Keberadaan pasar berkontribusi bagi perekonomian masyarakat

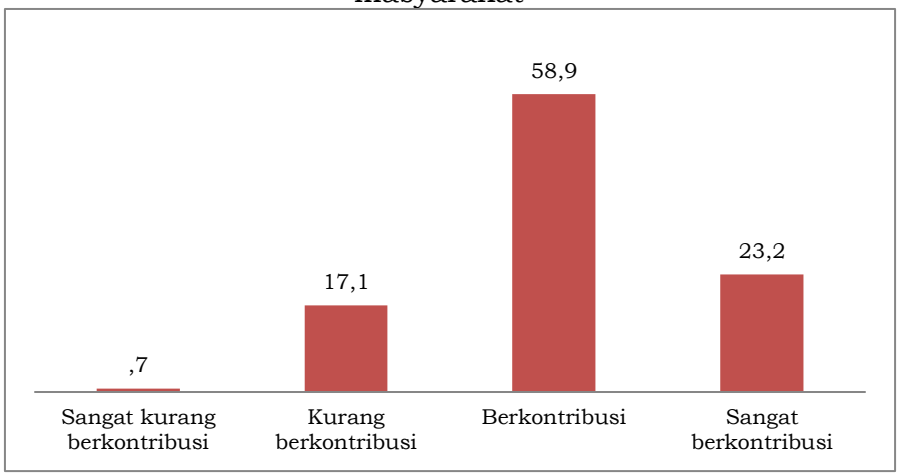

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

9. Infrastruktur pendukung Pariwisata (Jalan dan Jembatan menuju destinasi wisata)

Pada indikator ketersediaan infrastruktur destinasi wisata di wilayah Kabupaten Kutai kartanegara, hasil penelitian menunjukan bahwa 68,2% responden menilai tersedia, 17,9% kurang tersedia, 8,9% sangat kurang tersedia dan 5,0% sangat tersedia.

Gambar 4. 57. ketersediaan infrastruktur destinasi wisata di wilayah Kabupaten Kutai kartanegara

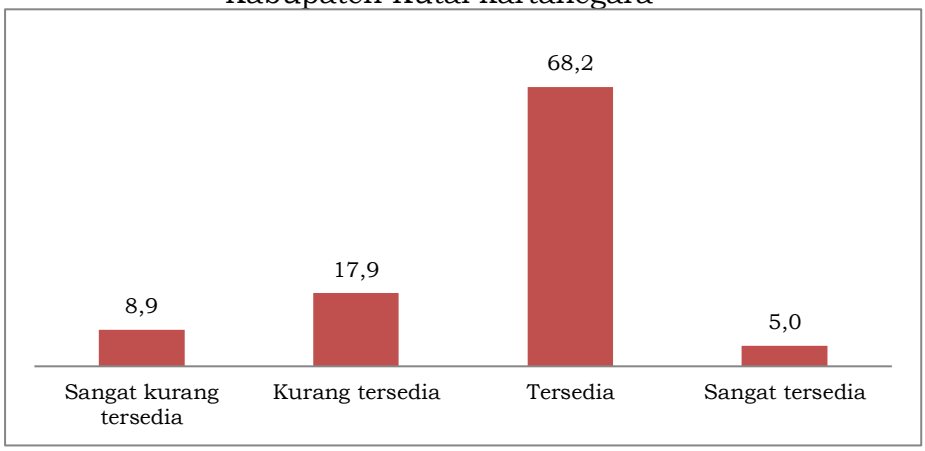

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator kualitas infrastruktur pendukung destinasi wisata, hasil penelitian menunjukan bahwa 66,7% infrastruktur pendukung tersebut berkualitas, 23,9% kurang berkualitas, 8,2% sangat kurang berkualitas dan 1,4% sangat berkualitas

Gambar 4. 58. Kualitas infrastruktur pendukung destinasi wisata

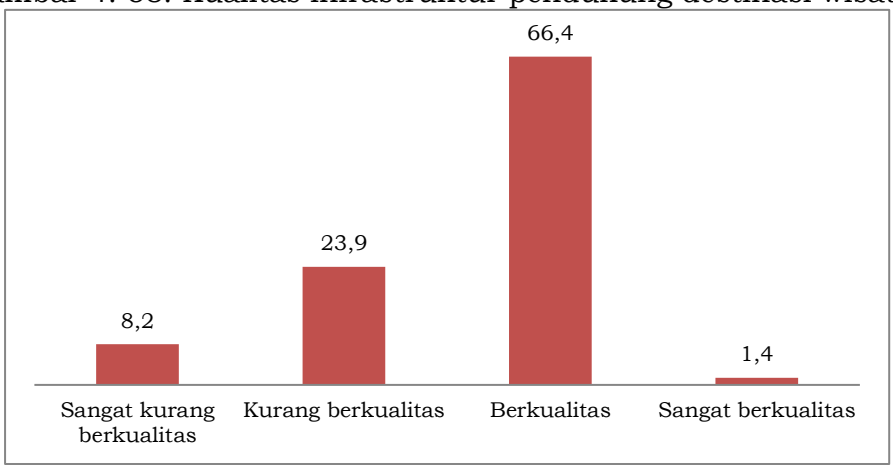

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator kesesuaian infrastruktur pendukung destinasi wisata dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa 63,8% sesuai, 25,4% kurang sesuai, 7,5% sangat kurang sesuai dan 3,6% sangat sesuai.

Gambar 4. 59. Kesesuaian infrastruktur pendukung destinasi wisata dengan kebutuhan masyarakat

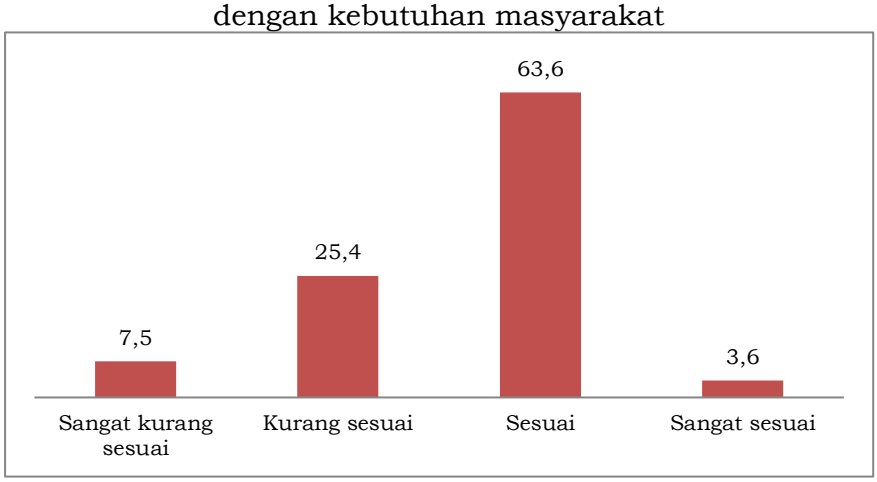

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator keberadaan infrastruktur destinasi wisata bermanfaat bagi wisatawan dan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa 68,9% bermanfaat, 15,4% kurang bermanfaat, 8,2% sangat bermanfaat dan 7,5% sangat kurang bermanfaat

Gambar 4.60. Keberadaan infrastruktur destinasi wisata bermanfaat bagi wisatawan dan masyarakat

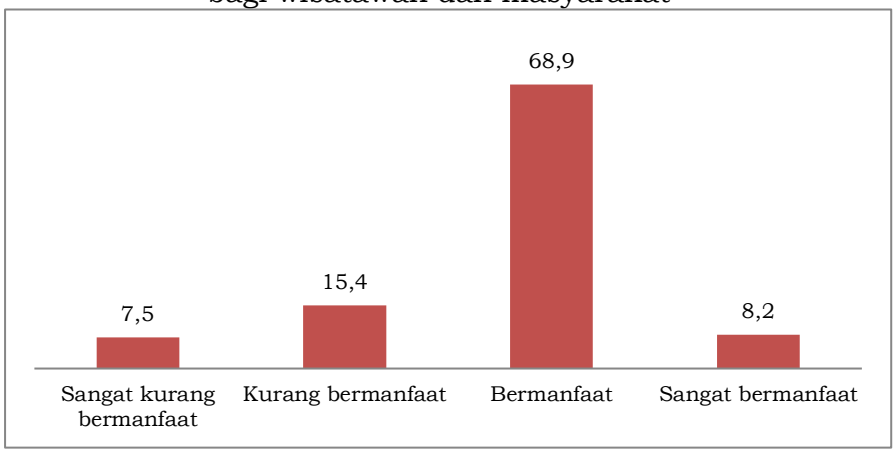

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Pada indikator pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan infrastruktur pendukung destinasi wisata, hasil penelitian menunjukan bahwa 44,3% responden menilai kurang melibatkan, 34,3% melibatkan, 15,4 sangat kurang melibatkan, dan 6,1% Sangat melibatkan.

Gambar 4. 61. Pelibatan tenaga kerja lokal dalam tahapan pembangunan infrastruktur pendukung destinasi wisata

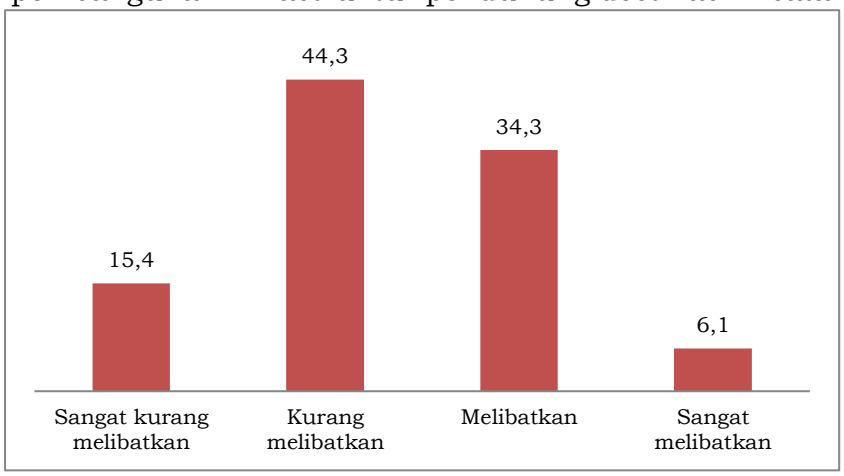

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

Terakhir, keberadaan infrastruktur pendukung destinasi wisata berkontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar, hasil penelitian menunjukan bahwa 59,6% responden menilai berkontribusi, 21,4%

kurang berkontribusi, 10% sangat kurang berkontribusi dan 8,9% sangat berkontribusi.

Gambar 4. 62. Keberadaan infrastruktur pendukung destinasi wisata berkontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar

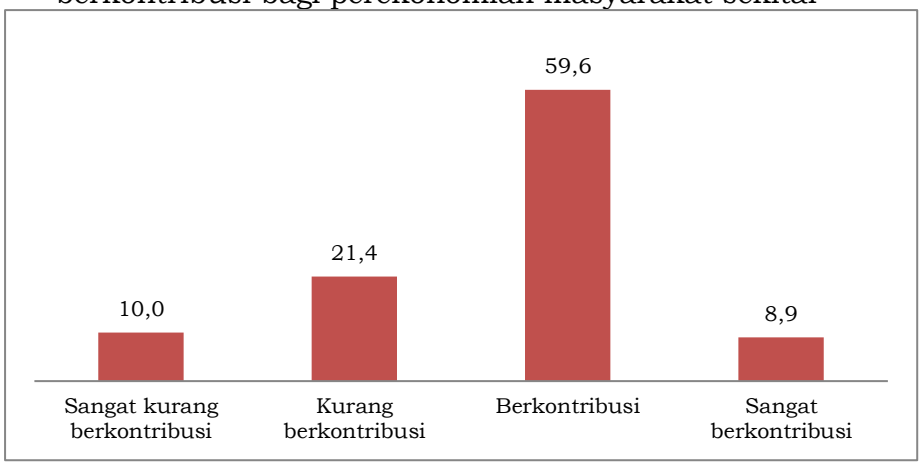

Sumber: diolah dari data penelitian, 2022

10. Nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Wilayah Kutai Kartanegara Per Indikator

Jika dibuat perbandingan nilai indeks antar bidang atau dimensi, maka indeks bidang pendidikan memiliki nilai indeks 77,62, diikuti bidang kesehatan dengan nilai indeks 77,95 dan kemudian penyediaan jaringan air bersih dengan nilai indeks 75,67.

Sementara nilai indeks terendah pada bidang infrastruktur embung dan irigasi pertanian dengan nilai indeks 58,39, diikuti bidang Infrastruktur Pendukung Destinasi Wisata dan Infrastruktur Drainase/ Parit untuk Pemukiman/ Perumahan dengan nilai indeks masing-masing 66,70.

Secara keseluruhan nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 2,83 atau 70,79 masuk dalam kategori C atau sedang.

Tabel 4. 2 Dimensi, Nilai Indeks, Nilai Konversi, Kategori dan Makna Indeks

No	Dimensi	Nilai Indeks	Nilai Konversi	Kategori	Makna
1	Infrastruktur Pendidikan	3,10	77,62	C	Sedang
2	Infrastruktur Kesehatan	3,04	75,95	C	Sedang
3	Infrastruktur Jalan & Jembatan	2,99	74,73	C	Sedang
4	Infrastruktur Embung dan Irigasi	2,34	58,39	D	Rendah
5	Infrastruktur Jaringan Air Bersih	3,03	75,67	C	Sedang
6	Infrastruktur Drainase/Parit Pemukiman/Perumahan	2,67	66,70	C	Sedang
7	Infrastruktur Layanan Persampahan	2,74	68,58	C	Sedang
8	Infrastruktur Pasar	2,91	72,84	C	Sedang
9	Infrastruktur Pendukung Destinasi Wisata	2,67	66,67	C	Sedang
	Nilai Rata-Rata Indeks Per Aspek	**2,83**	**70,79**	**C**	**Sedang**

Sumber: diolah dari data penelitian

Sementara jika dilihat dari indeks komposit pembentuk Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), indeks tertinggi ada diketersediaan infrastruktur yaitu sebesar 71,83 dan terendah pada pelibatan tenaga kerja lokal yaitu sebesar 60,63. Untuk meningkatkan nilai IKLI, keseluruhan indeks komposit ini harus ditingkatkan khususnya pada pelibatan tenaga kerja lokal.

Tabel 4. 3 Indeks Komposit pembentuk IKLI

No	Infrastruktur/ Dimensi	Ketersediaan	Kualitas	Kesesuaian	Kemanfaatan	Pelibatan	Kontribusi Ekonomi
1	Pendidikan	3,19	3,10	3,07	3,21	2,53	2,96
2	Kesehatan	3,09	3,04	3,05	3,18	2,46	2,85
3	Jalan dan Jembatan	3,08	2,82	2,95	3,17	2,48	3,05
4	Embung dan Irigasi	2,34	2,25	2,30	2,38	2,29	2,50
5	Jaringan Air Bersih	3,09	2,96	2,95	3,19	2,38	3,04
6	Drainase/ Parit	2,69	2,54	2,63	2,82	2,45	2,69

7	Layanan Persampahan	2,75	2,65	2,65	2,93	2,41	2,77
8	Pasar	2,95	2,78	2,89	3,05	2,51	3,05
9	Pariwisata	2,69	2,61	2,63	2,78	2,31	2,68
Rata-Rata		2,87	2,75	2,79	2,97	2,43	2,84
Indeks Komposit IKLI		71,83	68,73	69,77	74,17	60,63	71,05
Kategori		C	C	C	C	C	C
Makna		Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2022

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis indeks kualitas layanan infrastruktur di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 70,79 masuk dalam kategori C atau sedang.
2. Nilai indeks tertinggi pada infrastruktur pendidikan dengan nilai indeks 77,62 diikuti bidang kesehatan dengan nilai indeks 75,95 kemudian bidang jaringan air bersih dengan nilai indeks 75,67.
3. Nilai indeks terendah terdapat pada infrastruktur embung dan irigasi pertanian dengan nilai indeks 58,39 diikuti bidang Infrastruktur Pendukung Destinasi Wisata dan Infrastruktur Drainase/ Parit Pemukiman/ Perumahan dengan nilai indeks masing-masing 66,70.
4. Sementara jika dilihat dari indeks komposit pembentuk Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), indeks tertinggi ada di kemanfaatan infrastruktur yaitu sebesar 74,17 dan terendah pada pelibatan tenaga kerja lokal yaitu sebesar 60,63.

5.2. Rekomendasi

Secara keseluruhan aspek/dimensi yang menjadi unsur penilaian dalam indeks kualitas layanan infrastruktur di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mendapatkan perhatian khusus untuk ditingkatkan kualitasnya layanan infrastruktur, sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan nilai IKLI di Kabupaten Kutai Kartanegara, keseluruhan indeks komposit khususnya pada pelibatan tenaga kerja lokal harus ditingkatkan.
2. Perlunya sinergitas antar pemangku kepentingan khususnya para pimpinan perangkat daerah pengampuh urusan dalam hal

koordinasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Bappeda sebagai leading sektor perencanaan pembangunan perlu memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan, bermanfaat bagi masyarakat serta dapat berkontribusi bagi perekonomian khususnya bagi masyarakat yang menjadi lokus pembangunan.
4. Perangkat Daerah pelaksana pembangunan infrastruktur perlu memastikan dan menjamin kualitas infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Andy Tjiptono dan Gregorius Chandra, (2005), *Manajemen Kualitas Jasa*, Yogyakarta. ANDI

AZ, Nasution , 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media:Yogyakarta

BAPPEDA , Kutai Kartanegara. 2021. *Executive Summary RPJMD Kutai Kartanegara Periode 2021-2026*

Gibson, Ivancevich, Donnely. 1997. *Organizations (Terjemahan),* Cetakan Keempat, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama

Husein Umar. 1997. *Studi Kelayakan Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

J. Supranto. 1997. *Pengukuran Tingkat kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Rineka ipta

Kodoatie, Robert J., 2003, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Kotler, Philip dan Keller, 2007, *Manajemen Pemasaran*, Jilid I, Edisi Kedua belas, PT. Indeks, Jakarta

Kotler, Philip; Armstrong, Garry, 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran*,Jilid 1, Erlangga, Jakarta

Macmillan Dictionary of Modern economics. *Plagrave Macmillan*; 4th Revised edition edition (14 jul 1992)

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Rutherford, D. 1995. *Routledge Dictionary of Economics*

The World Bank. (1994). *World Development Report: Infrastructure for Development*. New York: Oxford University Press.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Nomor Kuesioner:.....

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN INFRASTRUKTUR

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pengantar Survei

Assalamu'alaikum, selamat pagi/siang/sore. Saya enumerator LPPM Unikarta bermaksud melakukan wawancara kepada Bapak/Ibu tentang **Persepsi Masyarakat terhadap Layanan Infrastuktur Kabupaten Kutai Kartanegara**.

Survei ini bertujuan untuk menggali sikap dan persepsi masyarakat terhadap kinerja dan layanan infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam survei ini Bapak/Ibu bebas menyampaikan pendapat dan semua informasi yang diberikan **tidak akan** berimplikasi apapun pada diri Bapak/ Ibu. Kami menjamin kerahasiaan semua jawaban atas pertanyaan yang kami sampaikan.

Hormat Kami,

Tim Survey

DATA RESPONDEN

Nama Responden : .....

Usia : .....

Pendidikan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Suku/ Asal Daerah : .....

Jenis Kelamin Responden : 1. Laki-Laki ☐ 2. Perempuan ☐

Alamat Lengkap : .....

Desa/ Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Nomor Telepon/ HP : .....

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang paling Bapak/ Ibu/ Saudara (B/I/S) setujui atau menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

I. Pendidikan

1	Bagaimana ketersediaan sarana pendidikan baik berupa PAUD, SDN, SMPN atau sekolah non formal/ informal (SNFI) yang disediakan oleh Pemkab. Kutai Kartanegara di wilayah B/I/S tinggal	a. sangat tersedia (lengkap)	b. tersedia	c. kurang tersedia	d. sangat kurang tersedia
2	Bagaimana kualitas sarana pendidikan tersebut	a. sangat baik	b. baik	c. kurang baik	d. sangat kurang baik
3	Bagaimana kesesuaian sarana pendidikan tersebut dengan kebutuhan masyarakat	a. sangat sesuai	b. sesuai	c. kurang sesuai	d. sangat kurang sesuai
4	Apakah keberadaan sarana pendidikan tersebut bermanfaat bagi masyarakat	a. sangat bermanfaat	b. bermanfaat	c. kurang bermanfaat	d. sangat kurang bermanfaat
5	Dalam tahapan pembangunan sarana pendidikan tersebut, bagaimana pelibatan tenaga kerja lokal	a. sanga banyak melibatkan	b. melibatkan	c. kurang melibatkan	d. sangat kurang melibatkan
6	Dengan adanya sarana pendidikan tersebut, apakah berkontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar	a. sangat berkontribusi	b. berkontribusi	c. kurang berkontribusi	d. sangat kurang berkontribusi

II. Kesehatan

1	Bagaimana ketersediaan sarana kesehatan (Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Daerah) di wilayah B/I/S tinggal	a. sangat tersedia	b. tersedia	c. kurang tersedia	d. sangat kurang tersedia
2	Bagaimana kualitas sarana kesehatan tersebut	a. sangat baik	b. baik	c. kurang baik	d. sangat kurang baik
3	Bagaimana kesesuaian sarana kesehatan tersebut dengan kebutuhan masyarakat	a. sangat sesuai	b. sesuai	c. kurang sesuai	d. sangat kurang sesuai
4	Apakah keberadaan sarana kesehatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat	a. sangat bermanfaat	b. bermanfaat	c. kurang bermanfaat	d. sangat kurang bermanfaat
5	Dalam tahapan pembangunan sarana kesehatan tersebut,	a. sanga banyak melibatkan	b. melibatkan	c. kurang melibatkan	d. sangat kurang melibatkan

	bagaimana pelibatan tenaga kerja lokal				
6	Dengan adanya sarana kesehatan tersebut, apakah berkontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar	a. sangat berkontribusi	b. berkontribusi	c. kurang berkontribusi	d. sangat kurang berkontribusi

III. Jalan dan Jembatan (konektifitas)

1	Bagaimana ketersediaan jalan dan/atau jembatan penghubung di wilayah B/I/S tinggal	a. sangat tersedia	b. tersedia	c. kurang tersedia	d. sangat kurang tersedia
2	Bagaimana kualitas jalan dan/atau jembatan tersebut	a. sangat baik	b. baik	c. kurang baik	d. sangat kurang baik
3	Bagaimana kesesuaian jalan dan/atau jembatan tersebut dengan kebutuhan masyarakat	a. sangat sesuai	b. sesuai	c. kurang sesuai	d. sangat kurang sesuai
4	Apakah keberadaan jalan dan/atau jembatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat	a. sangat bermanfaat	b. bermanfaat	c. kurang bermanfaat	d. sangat kurang bermanfaat
5	Dalam tahapan pembangunan jalan dan/atau jembatan tersebut, bagaimana pelibatan tenaga kerja lokal	a. sanga banyak melibatkan	b. melibatkan	c. kurang melibatkan	d. sangat kurang melibatkan
6	Dengan adanya jalan dan/atau jembatan tersebut, apakah berkontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar	a. sangat berkontribusi	b. berkontribusi	c. kurang berkontribusi	d. sangat kurang berkontribusi

IV. Embung dan Irigasi Pertanian

(khusus kawasan pertanian yaitu Kecamatan Muara Kaman-Sebulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong-Loa Kulu dan Marang Kayu)

1	Bagaimana ketersediaan embung dan/atau irigasi di wilayah B/I/S tinggal	a. sangat tersedia	b. tersedia	c. kurang tersedia	d. sangat kurang tersedia
2	Bagaimana kualitas embung dan/atau irigasi tersebut	a. sangat baik	b. baik	c. kurang baik	d. sangat kurang baik
3	Bagaimana kesesuaian embung dan/atau irigasi tersebut dengan kebutuhan masyarakat	a. sangat sesuai	b. sesuai	c. kurang sesuai	d. sangat kurang sesuai

4	Apakah keberadaan embung dan/atau irigasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat	a. sangat bermanfaat	b. bermanfaat	c. kurang bermanfaat	d. sangat kurang bermanfaat
5	Dalam tahapan pembangunan embung dan/atau irigasi tersebut, bagaimana pelibatan tenaga kerja lokal	a. sanga banyak melibatkan	b. melibatkan	c. kurang melibatkan	d. sangat kurang melibatkan
6	Dengan adanya embung dan/atau irigasi, apakah berkontribusi bagi perekonomian petani	a. sangat berkontribusi	b. berkontribusi	c. kurang berkontribusi	d. sangat kurang berkontribusi

V. Jaringan Air Bersih (PAM)

1	Bagaimana ketersediaan air bersih di perumahan atau pemukiman tempat B/I/S tinggal	a. sangat tersedia	b. tersedia	c. kurang tersedia	d. sangat kurang tersedia
2	Bagaimana kualitas air bersih tersebut	a. sangat baik	b. baik	c. kurang baik	d. sangat kurang baik
3	Bagaimana kesesuaian air bersih yang diterima tersebut dengan kebutuhan masyarakat	a. sangat lanca	b. lancar	c. kurang lancar	d. sangat kurang lancar
4	Apakah keberadaan jaringan air bersih tersebut bermanfaat bagi masyarakat	a. sangat bermanfaat	b. bermanfaat	c. kurang bermanfaat	d. sangat kurang bermanfaat
5	Dalam tahapan pembangunan jaringan air bersih tersebut, bagaimana pelibatan tenaga kerja lokal	a. sanga banyak melibatkan	b. melibatkan	c. kurang melibatkan	d. sangat kurang melibatkan
6	Dengan adanya jaringan air bersih tersebut, mampu mengatasi masalah kekurangan air bersih	a. sangat mampu	b. mampu	c. kurang mampu	d. sangat kurang mampu

VI. Drainase/ parit Perumahan/ Pemukiman

1	Bagaimana ketersediaan drainase/parit di perumahan atau pemukiman tempat B/I/S tinggal	a. sangat tersedia	b. tersedia	c. kurang tersedia	d. sangat kurang tersedia
2	Bagaimana kualitas drainase/parit tersebut	a. sangat baik	b. baik	c. kurang baik	d. sangat kurang baik
3	Bagaimana kesesuaian drainase/parit tersebut dengan kebutuhan masyarakat	a. sangat sesuai	b. sesuai	c. kurang sesuai	d. sangat kurang sesuai

4	Apakah keberadaan drainase/parit tersebut bermanfaat bagi masyarakat	a. sangat bermanfaat	b. bermanfaat	c. kurang bermanfaat	d. sangat kurang bermanfaat
5	Dalam tahapan pembangunan drainase/parit tersebut, bagaimana pelibatan tenaga kerja lokal	a. sanga banyak melibatkan	b. melibatkan	c. kurang melibatkan	d. sangat kurang melibatkan
6	Dengan adanya drainase/parit tersebut, mampu mencegah banjir/ genangan	a. sangat mampu	b. mampu	c. kurang mampu	d. sangat kurang mampu

VII. Layanan Persampahan (Tempat Pembuangan Sampah Sementara dan Angkutan Persampahan)

1	Bagaimana ketersediaan layanan persampahan di perumahan atau pemukiman tempat B/I/S tinggal	a. sangat tersedia	b. tersedia	c. kurang tersedia	d. sangat kurang tersedia
2	Bagaimana kualitas layanan persampahan tersebut	a. sangat baik	b. baik	c. kurang baik	d. sangat kurang baik
3	Bagaimana kesesuaian layanan persampahan tersebut dengan kebutuhan masyarakat	a. sangat sesuai	b. sesuai	c. kurang sesuai	d. sangat kurang sesuai
4	Apakah keberadaan layanan persampahan tersebut bermanfaat bagi masyarakat	a. sangat bermanfaat	b. bermanfaat	c. kurang bermanfaat	d. sangat kurang bermanfaat
5	Dalam tahapan pembangunan layanan persampahan tersebut, bagaimana pelibatan tenaga kerja lokal	a. sanga banyak melibatkan	b. melibatkan	c. kurang melibatkan	d. sangat kurang melibatkan
6	Dengan adanya layanan persampahan tersebut, mampu mencegah masalah lingkungan dan banjir	a. sangat mampu	b. mampu	c. kurang mampu	d. sangat kurang mampu

VIII. Pasar

1	Bagaimana ketersediaan Pasar di wilayah tempat B/I/S tinggal	a. sangat tersedia	b. tersedia	c. kurang tersedia	d. sangat kurang tersedia
2	Bagaimana kualitas bangunan pasar tersebut	a. sangat baik	b. baik	c. kurang baik	d. sangat kurang baik
3	Bagaimana kesesuaian bangunan pasar tersebut dengan kebutuhan masyarakat	a. sangat sesuai	b. sesuai	c. kurang sesuai	d. sangat kurang sesuai

4	Apakah keberadaan pasar tersebut bermanfaat bagi masyarakat	a. sangat bermanfaat	b. bermanfaat	c. kurang bermanfaat	d. sangat kurang bermanfaat
5	Dalam tahapan pembangunan pasar tersebut, bagaimana pelibatan tenaga kerja lokal	a. sanga banyak melibatkan	b. melibatkan	c. kurang melibatkan	d. sangat kurang melibatkan
6	Dengan adanya pasar tersebut, apakah berkontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar	a. sangat mampu	b. mampu	c. kurang mampu	d. sangat kurang mampu

IX. Infrastuktur pendukung Pariwisata (Jalan dan Jembatan menuju destinasi wisata)

1	Bagaimana ketersediaan infrastruktur pendukung destinasi wisata di wilayah tempat B/I/S tinggal	a. sangat tersedia	b. tersedia	c. kurang tersedia	d. sangat kurang tersedia
2	Bagaimana kualitas infrastruktur pendukung destinasi wisata tersebut	a. sangat baik	b. baik	c. kurang baik	d. sangat kurang baik
3	Bagaimana kesesuaian infrastuktur pendukung destinasi wisata tersebut dengan kebutuhan masyarakat	a. sangat sesuai	b. sesuai	c. kurang sesuai	d. sangat kurang sesuai
4	Apakah keberadaan infastruktur pendukung destinasi wisata tersebut bermanfaat bagi wisatawan/ masyarakat	a. sangat bermanfaat	b. bermanfaat	c. kurang bermanfaat	d. sangat kurang bermanfaat
5	Dalam tahapan pembangunan infrastuktur pendukung destinasi wisata tersebut, bagaimana pelibatan tenaga kerja lokal	a. sangat banyak melibatkan	b. melibatkan	c. kurang melibatkan	d. sangat kurang melibatkan
6	Dengan adanya infrastuktur pendukung destinasi wisata tersebut, apakah berkontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar	a. sangat berkontribusi	b. berkontribusi	c. kurang berkontribusi	d. sangat kurang berkontribusi

TERIMA KASIH